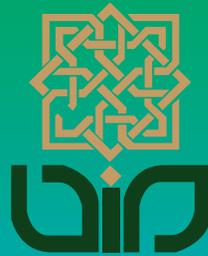


Momen Politik Mengantarkan Enam UIN



Reformasi 1998 mengantarkan transformasi IAIN menjadi UIN. Momen transisi demokrasi itu mencatat lahirnya perguruan tinggi Islam yang dikelola negara, yang belum pernah ada dalam sejarah umat Islam (Indonesia).

Sejak itu, terdapat enam UIN telah berdiri dan diresmikan di Indonesia. Dimulai dari UIN Syarif Hidayatullah DKI Jakarta (2002), UIN Sunan Kalijaga DI Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur (2004), UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat, hingga UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan (2005).

Sebagai universitas, UIN terbuka bagi seluruh warganegara. Para mahasiswa datang dari berbagai lapisan masyarakat. Fakultas dan program studi pun bertambah. Tidak ada lagi dikhotomi keilmuan. Ciri utamanya: keislaman, kemodernan (kekinian), dan keindonesiaan.

Secara historis, UIN berada dalam asuhan Kementerian Agama. Pada sisi lain, ada bebarapa fakultas dan prodi di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional. Ke depan, UIN masih akan memilih jalur "Ikhlas Beramal" atau pindah ke jalan "Tut Wuri Handayani"?

Jurnal Utama

RAPAT SENAT INSTITUT DAN PENANDATANGAN SKB Dua Menteri (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional) tentang Perubahan Bentuk IAIN Menjadi UIN itu berlangsung pada November 2001, bertepatan pada Ramadan 1422. SKB antara Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 4/U/KB/2001 dan Menteri Agama RI Nomor 500/2001 tanggal 21 November 2001 itu ditandatangani Menag Prof Dr Said Aqil Husin al-Munawar dan Mendiknas Prof Dr A Malik Fadjar, MSc. Dalam suasana bulan puasa itulah, pemerintah memberi rekomendasi dukungan secara legal terhadap perubahan IAIN menjadi UIN.

Penandatanganan SKB Dua Menteri itu buah kerja keras dari tim yang bertanggung jawab atas pemberian mandat yang lebih luas kepada IAIN Jakarta (*IAIN with Wider Mandate*) pada 1998. Efek domino dari pemberian mandat dan penandatanganan SKB itu terus berlanjut. Gayung terus bersambut. Rancangan Keputusan Presiden tentang Perubahan Bentuk IAIN menjadi UIN pun juga mendapat rekomendasi dan pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor 02/M-PAN/1/2002 Tanggal 9 Januari 2002 dan Nomor S-940/MK-2/2002 Tanggal 14 Februari 2002.

Rekomendasi inilah dasar dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 031 Tanggal 20 Mei Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adalah Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), yang juga ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menandatangani Keppres tersebut.

Tahun transformasi status itu akhirnya datang juga. Berubahlah institut (IAIN) menjadi univesitas (UIN) pada 2002. Jalan sejarah perguruan tinggi Islam negeri bergerak semakin maju.

Upacara peresmian perubahan status IAIN menjadi UIN itu diselenggarakan pada Sabtu, 8 Juni 2002, bertepatan dengan upacara Dies Natalis ke-45 (Lustrum ke-9). Wakil Presiden RI Hamzah Haz meresmikannya, yang dilanjutkan dengan memancangkan tiang pertama pembangunan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang didanai dari kocek Islamic Development Bank (IDB).

Semuanya bermula dari tekad dan nekad. Situasi sosiologis dan politik saat itu, yang dipengaruhi reformasi 1998, memungkinkan percepatan perubahan nomenklatur itu, baik secara kelembagaan maupun perluasan bidang keilmuan. Transformasi lembaga pendidikan Islam itu mendapat pengaruhuforia transisi menuju demokrasi di Indonesia.

Menurut Mendiknas Prof Dr A. Malik Fajar, MSc (2001-2004), selain modal keberanian dan kerja keras, ada faktor momen politik. "Ada terkait dengan momen politik. Kalau menteri berikutnya mendukung, kalau tidak mendukung? Saya punya *feeling*, perubahan bisa dimulai. Tentu ada yang cepat. Dan yang cepat saya lihat ada tiga. Jakarta di bawah Profesor Azyumardi, Malang di bawah Prof Prayogo, dan Yogya walaupun terseok-seok. Sebenarnya Yogya punya lingkungan cukup bagus," katanya.

Memang, IAIN Jakarta-lah yang mengawali perubahan



itu, pada masa kepemimpinan Prof Dr Azyumardi Azra, MA. Langkah ini diikuti IAIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim dan UIN Sunan Kalijaga. Transformasi keduanya didasarkan pada Surat Keputusan Presiden No. 50 Tanggal 21 Juni 2004.

UIN Malang diresmikan Menko Kesra ad Interim Prof Dr A Malik Fadjar, M.Sc bersama Menag Prof Dr Said Agil Husin Munawwar, M.A. atas nama Presiden pada Jumat, 8 Oktober 2004. Saat itu, UIN Malang dipimpin Prof Dr Imam Suprayogo. Meski demikian, UIN Malang menetapkan hari jadinya pada 21 Juni. Adapun deklarasi perubahan UIN Yogya dilaksanakan pada Kamis, 14 Oktober 2004. UIN Yogya saat dipimpin Prof Dr M Amin Abdullah.

Angin transformasi dari Jawa bagian timur melintasi wilayah Jawa bagian tengah, akhirnya sampai pula di Jawa bagian barat, Indonesia bagian timur, dan Indonesia bagian barat. Setahun setelah UIN Malang dan UIN Yogya, perubahan itu terjadi juga di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, IAIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, dan IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 yang ditandata-



JW/IDRIS THAHA

ngani pada 10 Oktober 2005, ketiga IAIN itu berubah status menjadi UIN. Untuk UIN Makassar, peresmiannya melalui penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Dr Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 Desember 2005 di Makassar.

Dalam jangka tiga tahun (2002-2005), umat Islam Indonesia memiliki enam Universitas Islam Negeri (UIN). Tak lama kemudian, Menteri Agama Muhammad M Basyuni mengeluarkan pernyataan mengejutkan kalangan dunia pendidikan. Ketika melantik Rektor IAIN Imam Bonjol Padang pada 15 Juni 2007, **Menag mengatakan, Departemen Agama—kini Kementerian Agama, menghentikan rencana perubahan. Penegasan itu dinyatakannya berulang-ulang hingga masa jabatannya pada Oktober 2009. “Saya stop dulu. Selama saya masih menjabat, tidak akan ada (lagi IAIN) yang berubah status (menjadi UIN),”** ujar Basyuni.

Perubahan itu bukan hanya ganti nama. Berdirilah fakultas-fakultas dan prodi-prodi baru. Tentu saja, fakultas-fakultas “bawaan” saat berstatus IAIN—Fakultas Tarbiyah, Fakultas Adab, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syariah, dan Fakultas Dakwah—tetap dipertahankan. Kelima fakultas ini

tetap berlanjut di UIN Jakarta, UIN Yogya, UIN Bandung, dan UIN Makassar.

Bahkan, nomenklatur fakultas-fakultas ini diberi tambahan. UIN Jakarta, Yogya, Bandung, Makassar, dan Pekanbaru tampaknya seragam mengubah dua fakultas dengan nomenklatur yang sama; yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Fakultas Syariah dan Hukum. Hanya saja, UIN Jakarta menambahkan menjadi nomenklatur Ilmu sebelum Tarbiyah.

Fakultas Adab diubah menjadi Fakultas Adab dan Humaniora (UIN Jakarta, Bandung, dan Makassar). UIN Yogya mengubah menjadi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. UIN Pekanbaru hingga kini belum memiliki Fakultas Adab.

Fakultas Dakwah diubah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi (UIN Bandung, Makassar, dan Pekanbaru). Sedangkan UIN Jakarta awalnya mengubah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, lalu Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, dan terakhir menjadi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDIKOM).

Adapun nomenklatur Fakultas Ushuluddin tidak berubah di UIN Bandung dan Pekanbaru. Di UIN Makassar menjadi Ushuluddin dan Filsafat. UIN Jakarta pada mulanya mengubah menjadi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, namun belakangan menghilangkan nomenklatur Filsafat. Di UIN Yogya, Fakultas Ushuluddin menjadi Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam

Rektor IAIN Jakarta (1994-1998)—yang juga Menteri Agama pada akhir pemerintahan Orde Baru, Prof Dr M Quraish Shihab belum melihat adanya integrasi pada nomenklatur fakultas-fakultas eks IAIN itu. “Yang kita lihat sekarang baru sebatas penyandingan bukan pengintegrasian, sekarang UIN sudah ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan lainnya tapi bagaimana mengintegrasikan itu, belum terasa sampai sekarang,” katanya.

Meski demikian, transformasi UIN memang benar-benar mendatangkan berkah. Beberapa fakultas dan prodi baru diizinkan beroperasi di enam UIN ini, dan tak bisa dikendalikan lagi keberadaannya. UIN Jakarta, misalnya. Sejak berstatus *IAIN with Wider Mandate* pada 1998, beberapa fakultas dan prodi telah disiapkan. Bahkan, melalui surat Nomor 088796/MPN/2001 Tanggal 22 November 2001, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional memberikan rekomendasi pembukaan 12 program studi (ilmu-ilmu sosial dan eksakta).

Kini, UIN Jakarta mengelola 11 fakultas—dengan puluhan prodi. Di antaranya, enam fakultas baru; Fakultas Dirasat Islamiyah, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

UIN Malang mengelola enam fakultas; dua berasal dari STAIN; Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah. Tidak seperti UIN lainnya, UIN Malang tidak mengubah nomenklatur kedua fakultas ini. Bahkan, UIN Malang tidak memiliki Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuluddin, sebagaimana dimiliki mayoritas UIN lainnya. Empat fakultas lainnya tergolong baru; Fakultas Humaniora dan Budaya, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas



UIN Pekanbaru

JW/IDRIS THAHA

Sains dan Teknologi.

UIN Yogya, UIN Bandung, dan UIN Makassar sama-sama mengelola tujuh fakultas; lima fakultas “bawaan” saat berstatus IAIN, dan hanya dua fakultas baru yang berdiri pada waktu berubah menjadi UIN. Ketiga UIN ini mendirikan satu fakultas yang sama: Fakultas Sains dan Teknologi. Satu fakultas lainnya berbeda-beda di setiap ketiga UIN ini. UIN Yogya memiliki Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Bandung mengelola Fakultas Psikologi, dan UIN Makassar mendirikan Fakultas Ilmu Kesehatan.

Adapun UIN Pekanbaru memiliki delapan fakultas; empat fakultas lama dan empat fakultas baru. Ketika menjadi universitas, UIN Pekanbaru menambah fakultas-fakultas berikut; Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan Fakultas Pertanian dan Peternakan.

Secara umum, keenam UIN ini memiliki fakultas baru yang sama saat bertransformasi status, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi. Begitu pula Fakultas Psikologi. Dari enam UIN itu, hanya UIN Yogya yang tampaknya belum berminat mendirikan Fakultas Psikologi. Lima UIN lainnya bersepakat mendirikan Fakultas Psikologi. Fakultas yang berkaitan dengan ekonomi hanya diminati tiga UIN, yaitu UIN Jakarta (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), UIN Malang (Fakultas Ekonomi), dan UIN Pekanbaru (Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial).

Ada fakultas-fakultas baru yang tidak dimiliki masing-masing UIN. UIN Jakarta memiliki tiga fakultas yang berbeda dari UIN-UIN lainnya. Yaitu, Fakultas Dirasat Islamiyah,

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UIN Malang mendirikan Fakultas Humaniora dan Budaya. UIN Yogya memiliki Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. UIN Makassar mendirikan Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan, UIN Pekanbaru mendirikan Fakultas Pertanian dan Peternakan. Fakultas-fakultas baru ini tampaknya menjadi ciri khas pembeda sekaligus kekuatan masing-masing UIN. Sementara UIN Bandung tidak memiliki fakultas baru yang berbeda.

Semua fakultas itu berada di jenjang S1. Bagaimana dengan jenjang pendidikan di S2 dan S3? Keenam UIN itu telah mendirikan Pascasarjana, jauh sebelum berubah status. Bedanya? UIN Jakarta menggunakan nomenklatur Sekolah Pascasarjana—awalnya Fakultas Pascasarjana lalu berubah menjadi Program Pascasarjana, dan terakhir Sekolah Pascasarja. Lima UIN lainnya mempertahankan dengan nama Program Pascasarjana.

Secara umum, Pascasarjana di UIN-UIN ini masih berkat pada program studi mengenai kajian Islam (*islamic studies*), yaitu “keinstitutan”, dan belum membuka program studi yang terkait dengan “keuniversitasan”. Khusus di UIN Jakarta, beberapa fakultas membuka jenjang pendidikan Pascasarjana. Sejak tahun akademik 2010/2011, tiga fakultas sudah memulai perkuliahan program magister, yaitu; Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Fakultas Psikologi (FPsi), dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST). FITK yang merupakan fakultas tertua di UIN Jakarta membuka program magister Pendidikan Bahasa Inggris (PBI). Disusul dengan pembukaan program magister Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) tahun ini.

Seperti diakui Rektor UIN Jakarta (2002-2006), Azyu-

mardi Azra, fakultas-fakultas baru itu—di samping fakultas-fakultas eks IAIN—menghasilkan perkembangan yang dalam istilahnya adalah *beyond imagination*, tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Santri-santri pesantren khususnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi ahli ekonomi, teknologi, kedokteran, kesehatan, politik, ahli pertanian, peternakan, ahli budaya, dan lainnya.

“Umat-bangsa jelas memerlukan tidak hanya lulusan yang menguasai tafsir, hadis, kalam, fikih, dan seterusnya, tetapi juga tamatan yang menguasai bidang-bidang semacam sains-teknologi, kedokteran, farmasi, kesehatan masyarakat, dan seterusnya,” papar Azyumardi.

Transformasi IAIN menjadi UIN itu juga bersentuhan dengan pembangunan infrastruktur. Bentuk bangunan tiap UIN berbeda-beda. Secara umum, konsep bangunannya memadukan nuansa keislaman dan arsitektur modern.

Pembangunan sarana dan prasarana di enam UIN itu berasal dari dana Islamic Development Bank. IDB mengucurkan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi semua UIN di Indonesia. IDB juga membangun gedung laboratorium, pusat pelatihan, pusat bahasa dan budaya, student center, poliklinik, perumahan dosen/karyawan dan sarana perlengkapan seperti sarana pembelajaran, komputer, laboratorium MIPA, pangan, *macro teaching* dan studio, peralatan perpustakaan, peralatan pusat bahasa dan budaya, peralatan poliklinik, generator dan sarana pendukung lainnya.

Layaknya gedung modern, gedung ini dilengkapi dengan lift, pendingin ruangan, ruang teater, ruang rapat, musala, ruang multimedia dan perlengkapan pendukung lainnya.

Di UIN Jakarta, baik di kampus 1 Jalan Ir H Djuanda

maupun kampus 2 Jalan Kertamukti Pisangan, misalnya, pembangunan sarana dan prasarana itu meliputi empat gedung perkuliahan, yaitu gedung fakultas 1 (FITK), fakultas 2 (FSH dan FAH), fakultas 3 (FU dan FIDIKOM), fakultas 4 (FEB dan FST). Gedung-gedung perkuliahan itu berlantai tujuh. Juga, gedung Syahida Inn, gedung Sekolah Pascasarjana, Pusat Bahasa, dan gedung PPIM. Gedung-gedung UIN Jakarta dijadikan pilot project pembangunan gedung-gedung di lembaga pendidikan Islam lainnya, termasuk di lima UIN.

UIN Jakarta, khususnya, juga mendirikan gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan bantuan dari pemerintah Jepang. Kini gedung FKIK berikut asramanya berdiri kokoh. Gedung berlantai lima ini memiliki gaya dan arsitektur bangunan yang memadukan nuansa Timur Tengah dan desain modern.

Bantuan dana pembangunan infrastruktur juga datang dari Pemerintah Korea Selatan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF). Jika memasuki kampus 2 menyusuri Jalan Kertamukti, sebuah gedung dengan warna putih krem berdiri megah. Inilah gedung Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Nasional yang dibangun atas kerjasama Kementerian Komunikasi dan Korea Selatan dengan UIN Jakarta. Kecuali itu, ada pula gedung Fakultas Psikologi, Laboratorium Psikologi, dan gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Gedung-gedung baru pasti segera menyusul. Termasuk pula fakultas-fakultas baru; lambat maupun cepat. Semua serba baru itu tidak bisa dihentikan. Tentu saja dengan semangat yang terus harus diperbaharui. Bagaimana dengan sumber daya manusianya. Inilah tantangan UIN-UIN ke depan. □ IDRISTHAHA



JW/IDRIS THAHA

UIN Makassar

Merespon RUU Pendidikan Tinggi

Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) terus dibahas, meski memancing kontroversi. Pembahasannya tuntas tahun ini sehingga bisa diterapkan tahun depan. Namun, RUU PT itu bisa menggagalkan implementasi gagasan integrasi ilmu pengetahuan.

AKHIR SEPTEMBER LALU, Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, mengungkapkan optimismenya bahwa Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) selesai dirumuskan tahun ini. Dengan begitu, papar Rektor Institut Teknologi Surabaya periode 2003-2006 ini, RUU tersebut sudah bisa diaplikasikan pada tahun depan. "Sehingga tahun 2012, Perguruan Tinggi sudah memiliki payung hukum," ujarnya.

Nuh menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan RUU PT secara pasal per pasal. Dalam draft yang disampaikan ke DPR, secara teknis RUU terbagi dalam 12 Bab dengan memuat 102 pasal. Beberapa bab di antaranya mengatur tentang Pengembangan Perguruan Tinggi, Jenis dan Bentuk Pendidikan Tinggi, Program Studi dan Kurikulum, Ijazah dan Gelar, dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Pemimpin Panja RUU PT Rully Chairul Azwar pun tidak menampik bila *beleid* tersebut kelar tahun ini. Pasalnya, Rully menuturkan, parlemen pun sudah menempatkan RUU PT dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2011. Rully menambahkan, DPR melihat keberadaan RUU PT sangat mendesak untuk segera dibahas mengingat tujuannya membenahi pendidikan tinggi kita.

Dari keseluruhan pasal yang termuat, Nuh melanjutkan, empat di antaranya merupakan inti dari undang-undang yang tengah dirumuskan tersebut. Pertama, perguruan tinggi harus berbentuk nirlaba. Kedua, perguruan tinggi harus memiliki otonomi. Ketiga, memiliki akuntabilitas dan transparansi sehingga tidak bertabrakan dengan prinsip nirlaba. Keem-

pat, perguruan tinggi harus berkeadilan yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama pada masyarakat.

Kendati begitu, kehadiran RUU Pendidikan Tinggi tak urung menimbulkan tanda tanya dan keraguan publik. Publik menilai, jang-jangan kehadirannya tidak lebih dari 'ganti baju' payung hukum perguruan tinggi pasca pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) oleh Mahkamah Konstitusi pada 2010.

Secara substansial, Prof Dr Sudjito SH MSi, Anggota Tim Ahli Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, menilai RUU PT masih sama dengan UU BHP mengingat RUU PT masih mengakomodir upaya komodifikasi pendidikan. Selain itu, papar dia, UU itu lebih mencerminkan sikap



JW/ZAENAL MUTTAQIN

reaktif dalam memperbaiki sistem pendidikan tinggi di Indonesia pasca dibatalkannya UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi. Substansi pengaturan dalam RUU PT tidak berbeda jauh dengan UU BHP.

Penyusun RUU PT juga terkesan tidak memperhatikan substansi yang diatur dengan UU, Peraturan Pemerintah, atau pun Statuta. Peraturan setingkat UU seharusnya cukup mengatur hal-hal mendasar yang merupakan penjabaran hak-hak konstitusional warga negara. Sedangkan ketentuan yang mengatur keunikan dan kekhasan perguruan tinggi semestinya cukup diatur dengan statuta.

Selain memancing kritik mendasar dari *stakeholder* pendidikan nasional, kehadiran RUU PT sebagai aturan baru perguruan tinggi—meski masih berupa rancangan—tak urung menimbulkan reaksi dan kritik dari *stakeholder* perguruan tinggi Islam. Kehadiran RUU PT itu bisa membuat pengembangan keilmuan di perguruan tinggi Islam berjalan di tempat, sehingga implementasi integrasi ilmu pengetahuan yang terkristalisasi melalui pendirian Universitas Islam Negeri (UIN) bisa gagal di tengah jalan.

Titik kritik dari perguruan tinggi Islam adalah adanya klasifikasi antara PTN dan PTN Khusus dalam pengelolaan perguruan tinggi. Disebutkan dalam RUU, PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan PTN Khusus adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan dan dikelola oleh Kementerian lain atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian bersama Kementerian Pendidikan Nasional. Selain itu, juga dibedakan antara PTN dan PTN Khusus berbadan Hukum, PTN dan PTN Khusus Mandiri dan PTD dan PTN Khusus Unit Pelaksana Teknis.

Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof Dr Imam Suprayogo, mengatakan klasifikasi berdasar pengelolaan membawa konsekuensi bahwa program studi ilmu-ilmu umum yang berada di UIN akan dialihkan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan program studi ilmu khusus yang berbau agama ditangani



Penandatanganan Prasasti UIN Malang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Kementerian Agama.

Bila demikian, itu artinya sama dengan kondisi dikhotomis pada saat PTAIN masih berstatus STAIN atau IAIN. Dengan fokus pendidikan akademik yang terbatas pada keilmuan Islam yang cenderung nomatif dan sempit, posisi STAIN dan IAIN di mata organisasi birokrasi dan swasta nasional berada pada posisi nomor kesekian di belakang Perguruan Tinggi Umum seperti UI, UGM, ITB, dan IPB.

Dikhotomi sebetulnya sudah coba dihapuskan, jelas Imam, melalui transformasi beberapa PTAIN yang berstatus IAIN/STAIN menjadi UIN sehingga perguruan tinggi Islam mampu berkontribusi pada penyelesaian problematika umat. Terlebih, secara epistemologis, Islam juga berdimensi universal dengan tidak mendikhotomikan disiplin keilmuan Islam dan pengetahuan umum. Karenanya, beberapa UIN—yang mewakili perkembangan maju PTAIN—bertransformasi dengan membuka beberapa fakultas non-agama seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Fakultas Humaniora dan Budaya, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.

Namun dengan kehadiran RUU PT ini, dikhotomi kelembagaan antara perguruan tinggi ilmu umum yang berada di bawah kontrol Kementerian Pendidikan Nasional



Penekanan tombol oleh Wapres Hamzah Haz tanda dimulainya pembangunan gedung UIN Jakarta



Peresmian Pemakaian Gedung UIN Pekanbaru oleh Menteri Agama Suryadharma Ali

Jurnal Utama

dengan perguruan tinggi ilmu agama yang berada di bawah pantauan Kementerian Agama yang dicoba dihapuskan melalui transformasi IAIN menjadi UIN kembali menajam. Padahal fakta saat ini pun, imbas warisan dikhotomi masa lalu masih dirasakan pada pengembangan fakultas/program studi non agama pasca perubahan IAIN menjadi UIN.

Sebut, misalnya, pada beberapa kasus dalam olimpiade teknologi informatika, perguruan tinggi negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Alasannya PTAIN dinilai tidak cocok dan tidak linier. Padahal di beberapa PTAIN sudah dikembang-

kan fakultas dan puluhan program studi non agama.

Selain itu, sisa warisan dikhotomi juga masih dirasakan hingga saat ini berupa minimnya dana-dana penelitian program studi non-agama di hampir seluruh UIN bila dibandingkan perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Padahal dengan spesifikasi penelitian program studi seperti teknologi informatika, kimia, dan fisika, membutuhkan sumber pendanaan yang benar-benar memadai untuk menghasilkan karya riset unggulan.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof Dr Nanat Fatah Natsir MS, mencontohkan, setelah beberapa

Prof Dr Abdul Malik Fadjar
Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004)

Harus Siap Mainkan Peranan Global



JW/AFRIANI

SECARA HISTORIS UIN berada pada Kementerian Agama. Koordinasi perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Nasional lebih merupakan sikap politik daripada sikap akademik. RUU PT tidak perlu diperdebatkan.

Pemerintah dan DPR sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT). Tanggapan Anda?

RUU PT yang sedang diproses di DPR dalam konteks mengganti Badan Hukum Pendidikan Nasional (BHPN).

Sebetulnya UU pendidikan tinggi bukan barang baru. Dulu namanya UU No. 22 Tahun 1961. Sudah mengatur semua pendidikan tinggi negeri dan swasta. Ada juga UU Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Perwujudan lembaga pendidikan tersebut didasarkan atas undang-undang. Yang saya tahu, undang-undang perguruan tinggi tahun ini harus sudah final. Semua perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta sama saja.

Dengan UU tersebut, apakah UIN masuk Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Nasional?

tahun berubah menjadi universitas, nilai nominal dana penelitian individu yang didapat dosen program studi umum di UIN masih sama seperti nilai nominal yang didapat rekan mereka di program studi keagamaan dengan kisaran Rp 10-12 juta per subjek penelitian. Jumlah ini jauh di bawah kebutuhan ideal per subjek penelitian di program studi umum. "Kalau di fakultas umum, dana penelitian sebesar itu bisa untuk apa?" sebut Nanat.

Imam menambahkan, alih-alih mendorong PTAIN berkontribusi bagi penyelesaian problematika umat yang semakin luas, keberadaan RUU PT malah bisa membalikkan

kondisi perkembangan PTAIN yang bertransformasi menjadi UIN pada kondisi yang sama seperti masih berupa IAIN/STAIN dengan cakupan keilmuan yang sempit dan terbatas pada beberapa disiplin keilmuan seperti Syariah, Ushuluddin. "(Dengan demikian) UIN tidak lagi berbicara tentang ekonomi, psikologi, dan sains dan teknologi. Bila demikian, maka kajian Islam tentang ilmu pengetahuan akan menjadi miskin, tereduksi," tandas Imam.

Nanat juga mengungkapkan, perumusan RUU PT seharusnya ditempatkan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di seluruh perguruan tinggi nasional, baik yang berba-

Itu sudah menyangkut teknis administratif saja. Pada intinya UIN telah masuk ke lembaga pendidikan tinggi negeri. Bahwa sistem *budgeting*nya ada di Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Nasional tidak masalah. Secara historis, administratif anggaran UIN masuk ke Kementerian Agama. Itu menyangkut sejarah dan kebijakan. Jadi tidak bisa disuruh memilih. UIN itu kan punya sejarah. Kementerian Agama itu punya empat tugas; menciptakan kehidupan beragama yang sesuai dengan UUD 1945 pasal 29, mewujudkan pendidikan agama, melaksanakan peradilan agama, dan mengatur pelaksanaan haji.

Menurut saya itu sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Karena, ini merupakan sejarah bangsa. Memang ada orang yang mengatakan kalau masuk di Kementerian Agama anggarannya sedikit. Menurut saya sama saja. Jangan dikira perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional anggarannya besar. Sekarang di Kementerian Agama sudah relatif lebih baik. Jadi, itu sikap politik saja, daripada sikap akademik. Hanya pembidangan ilmunya saja. Kalau mau mendirikan Fakultas Kedokteran konsultasinya ke konsorsium. UI juga begitu waktu ingin membuka prodi agama ya konsultasinya ke Kementerian Agama. Di gajah mada juga begitu. Demikian juga jika kita ingin membuka prodi umum, konsultasinya ke Kementerian Pendidikan Nasional. Nanti yang mengesahkan juga Kementerian Agama.

Sejauhmana Anda melihat proses dari pelaksanaan transformasi IAIN menjadi UIN?

Itu perwujudan tuntutan dari perkembangan modern. IAIN menjadi universitas, sama juga dengan IKIP menjadi universitas, lebih multidisiplin. Itu juga lahir atas dasar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

UIN harus siap memainkan peranan secara global setahap demi setahap. Dan ini sudah dilakukan. UIN Jakarta termasuk pendahulunya. Banyak orang bilang perkembangan UIN Jakarta ini cepat sekali. Itu orang lain yang menilai. Lebih bagus seperti itu daripada kita yang menilai sendiri. Lebih objektif. Tapi dilihat dari faktanya UIN Jakarta memang cepat berkembang. Tapi, masih ada yang belum menerima itu. Jangan dikira setelah berubah semua orang menerima. Tidak. Banyak orang mempertanyakan setelah berubah di mana ilmu agamanya. Pikiran seperti itu juga masih ada.

Apa kelemahan dan kelebihan dari proses yang dilaksanakan pada transformasi tersebut?

Itu proses yang tidak pernah berakhir, karena pengemban-

gan antar disiplin, inter disiplin itu sebuah proses yang terus-menerus. Sekarang di UI pun ada Program Studi Timur Tengah, di UGM ada. Jadi hampir semua lembaga pendidikan tinggi mengembangkan humaniora, mengembangkan agama. Sekarang agama bukan milik UIN saja. Begitu juga studi umum, di UIN ada Fakultas Kedokteran, tentu secara proses pembentukan bangunan keilmuan memang merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Tapi tidak perlu dipersoalkan.

Tentu kita harus menyiapkan SDM, serta sarana prasarana yang sesuai tuntutan integrasi itu. Lebih lanjut, sinerginya apa sudah terbentuk atau belum antara tiap fakultas, karena harus tetap berbasis pada nilai-nilai dasar Islam.

Bagaimana dengan integrasi keilmuan yang dilakukan UIN?

Itu proses terus-menerus yang setiap saat harus dilakukan dan dikritisi. Sekarang ini orang sudah tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, tapi sudah mencoba untuk memberikan kerangka pandang yang sama. Di Timur Tengah, seperti al-Azhar sudah ada ilmu umumnya. Jadi tidak perlu dirisaukan. Yang kita perlu risaukan, kalau kita tidak mampu mengembangkan secara kreatif dengan tuntutan global. Karena, itu terkait dengan kesiapan SDM, anggaran dan hal-hal yang terkait. Selain itu perguruan tinggi di dunia pun mengembangkan studi Islam.

Apa tantangan yang harus dihadapi UIN?

Sama dihadapi pada dunia pendidikan pada umumnya, dan dunia pendidikan tinggi khususnya, tantangannya pada mutu. Mutu itu ditentukan oleh banyak hal, tanda petik *lob* karena mutu juga merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Ditentukan oleh SDMnya, *budgeting*, dan sistem pengembangan akademiknya. Menurut saya dari segi fasilitas relatif berkembang, tapi yang paling berat dalam peningkatan mutu adalah pengembangan sistem SDMnya. Hal itu tidak begitu berat jika UIN bersinergi dengan berbagai lembaga pendidikan dan berbagai institusi baik di dalam maupun luar negeri

Khusus UIN Jakarta, faktor letak juga mempengaruhi. Kalau di sini *kan* Jakarta, dekat dengan UI dan universitas lain. UIN Yogya dekat dengan UGM. Kalau jauh susah. Tapi hampir semua UIN ada di lingkungan pendidikan tinggi. Karena kita tidak mungkin memisahkan antara UIN, UI, UIJ dan perguruan tinggi swasta yang lain. □ ELLY AFRIANI



JW/IDRIS THAHA



sis keagamaan, umum, maupun integrasi keduanya, bukan malah mengkotak-kotakannya dalam beberapa klasifikasi. Sebaliknya, papar dia, RUU PT seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip akademis seperti kesetaraan, keterbukaan, dan obyektivitas di perguruan tinggi yang terbuka dan universal.

Dan upaya tersebut, menurut Nanat, bisa direalisasikan dengan hanya menetapkan standar nasional yang bisa diacu seluruh perguruan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama. Selain itu, para pengambil kebijakan juga harus adil, memberikan ruang bagi perguruan tinggi Islam negeri untuk bisa mengejar kemajuan yang dicapai perguruan tinggi umum dalam berkontribusi pada pembangunan masyarakat seperti pengucuran dana penelitian secara proporsional.

Sementara Imam berharap celah dikhotomis kelembagaan dalam bentuk klasifikasi pengelolaan perguruan tinggi seperti klasifikasi antara Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Khusus dalam RUU PT bisa dihapuskan. Menurut Imam, keberadaan RUU PT memang dibutuhkan sebagai payung hukum pengembangan perguruan tinggi. Namun bukan berarti RUU PT harus mendikhotomikan perguruan tinggi yang diklasifikasikan sebagai Perguruan Tinggi Khusus. Sebab dikhotomi demikian bisa berimbas pada diskriminasi kelembagaan bagi kelompok perguruan tinggi demikian.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Dr Musa Asy'arie, menambahkan perumusan payung hukum perguruan tinggi seperti RUU PT seharusnya mengakomodasi dinamika perkembangan perguruan tinggi yang beragam fokus pengembangan akademiknya. Perumusan payung hukum tidak bisa hanya mengakomodasi beberapa model perguruan tinggi tertentu semata serta mengikuti kemauan segelintir elit kelompok kebijakan. Sebab seperti apapun bentuk dan substansi payung hukumnya, pemerintah sendiri yang akan menanggung konsekuensinya.

Baik Rektor UIN Alauddin Makassar Prof Dr A Qadir

Gassing HT maupun Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Prof Dr M Nazir memberi catatan terhadap RUU PT itu. Seperti rektor UIN lainnya, keduanya sepakat menolak adanya klausul PTU dan PTN Khusus. Menurut Nazir, dalam pertemuan dengan rektor-rektor UIN di Malang, istilah PTN Khusus itu sebaiknya ditinjau ulang. "Semua pendidikan tinggi yang dikelola dan dibiayai negara disebut Pendidikan Tinggi Negeri. Tidak perlu disebut Khusus," kata Nazir.

"Kalau kita terima istilah PTN Khusus, maka UIN bubar karena Kemenag hanya bisa mengurus pendidikan agama, dan Kemenag tidak boleh mengurus perawat, farmasi, dan prodi-prodi umum," kata Qadir.

Qadir dan Nazir mengusulkan adanya kementerian tersendiri yang mengurus perguruan tinggi. Tidak di Kemenag, dan juga tidak di Kemendiknas. Namanya bisa Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. "Seluruh pendidikan tinggi di seluruh kementerian melebur, baik swasta maupun negeri. Tidak usah tambah kementerian, karena Kementerian Riset sudah ada," kata Qadir.

Dengan adanya kementerian sendiri, kata Qadir, tidak akan ada lagi perbedaan aturan, perlakuan dalam anggaran, seperti yang terjadi selama ini di Kemendiknas dan Kemenag. Ini juga dimaksudkan untuk mensinergikan dan mengkolaborasi antara perguruan tinggi dan riset. Selama ini, keduanya terpisah. "Akibatnya, riset-riset kita tidak berdampak baik. Tidak untuk perkembangan keilmuan. Tidak berdampak baik untuk masyarakat. Untuk usaha juga tidak," kata Nazir.

Apapun pilihannya, enam UIN di Indonesia sudah berdiri, dan tidak bisa dibubarkan. Menurut Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Komaruddin Hidayat, UIN-UIN adalah hasil inovasi dan eksperimentasi sejarah. "Sebuah loncatan luar biasa. Untuk menilai UIN jangan fokus apa yang telah diraih hari ini. Posisikan UIN dalam perspektif pembangunan bangsa dan memajukan umat yang selama ini sering merasa ditinggalkan oleh negara," kata Komaruddin. □

IDRIS THAHA DAN ZAENAL MUTTAQIN



Azyumardi Azra

Kebangkitan UIN

SEJAK TAHUN-TAHUN awal dasawarsa milenium baru, nomenklatur kelembagaan pendidikan tinggi Islam Indonesia diperkaya dengan istilah UIN, singkatan dari Universitas Islam Negeri. Kemunculan istilah UIN secara resmi dimulai dengan perubahan IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 20 Mei 2002. Dua tahun berikutnya, pada 2004 IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang menjadi UIN Malang. Terakhir, pada 2005, tiga UIN lagi muncul UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan UIN Alauddin Makassar.

Kemunculan UIN jelas lebih daripada sekadar perubahan nomenklatur atau kemunculan nomenklatur baru. Ia sekaligus merupakan hasil dari proses-proses panjang perkembangan pendidikan Islam secara keseluruhan di Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Perkembangan itu bahkan juga terkait dengan perubahan-perubahan berdampak panjang yang terjadi di tanahair, baik dalam bidang pendidikan maupun kehidupan sosial, budaya, ekonomi, agama, politik dan sebagainya sejak masa awal kemerdekaan, Orde Baru, dan puncaknya pada masa pasca-Soeharto. Kombinasi berbagai faktor itu, akhirnya mencapai kulminasinya pada masa Reformasi ketika demokrasi dan liberalisasi pendidikan juga mendatangkan 'berkah' bagi lembaga pendidikan tinggi Islam.

Beyond Imagination dan Mainstreaming

Jika dirunut secara historis, umat Islam Indonesia sejak masa penjajahan Belanda telah memendam aspirasi sangat kuat untuk memiliki pendidikan tinggi, yang memungkinkan anak-anak santri untuk melanjutkan pendidikan mereka. Pada zaman Belanda sampai masa kemerdekaan hanya ada dua 'sekolah tinggi' di Indonesia; Sekolah Tinggi Teknik (yang kemudian menjadi ITB) di Bandung, dan STOVIA (Sekolah Tinggi Kedokteran, yang kemudian menjadi UI) di Jakarta. Keduanya memiliki daya tampung terbatas; dan karena kelemahan dalam pendidikan, anak-anak santri tidak memiliki akses untuk bisa masuk ke dalam kedua sekolah tinggi tersebut.

Sejauh menyangkut Perguruan Tinggi Agama Islam yang diselenggarakan negara, aspirasi ini mulai terwujud dengan pembentukan PTAIN di Yogyakarta dan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) di Jakarta pada 1957. Keduanya kemudian masing-masing menjadi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sepanjang akhir 1960. Selanjutnya, sejak akhir 1960-an dan 1970-an, IAIN-

IAIN lainnya berdiri di berbagai ibukota provinsi, sehingga sampai awal 2002 jumlahnya mencapai 14 IAIN di seluruh Indonesia. Dan, sejak 1998, fakultas-fakultas cabang IAIN yang terdapat di berbagai kotamadya dan kabupaten dilepaskan dari IAIN induknya dan berubah menjadi STAIN, yang berjumlah 33 di seluruh Indonesia.

Harus diakui, eksistensi IAIN dan STAIN dalam banyak segi, pada dasarnya, turut melestarikan 'dikhotomi' antara pendidikan agama (Islam) dan pendidikan umum. Sesuai dengan undang-undang dan ketentuan tentang pendidikan tinggi yang lama, IAIN dan STAIN hanya memiliki mandat untuk bergerak dalam bidang yang sering disebut sebagai 'ilmu-ilmu agama' (Islam), sejak dari syariah, tarbiyah, tafsir-hadis, tasawuf, dakwah, adab, dan semacamnya. IAIN dan STAIN pada dasarnya tidak memiliki mandat untuk juga bergerak dalam 'ilmu-ilmu umum'. IAIN dan STAIN memang pernah main 'kucing-kucingan' dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) ketika membuka program 'tadris' di Fakultas Tarbiyah, yang sebenarnya merupakan program studi umum yang merupakan mandat istimewa Kemendiknas belaka.

Perubahan IAIN/STAIN menjadi UIN dalam konteks terakhir merupakan perluasan mandat perguruan tinggi agama Islam (PTAIN). Sebagai universitas, UIN tidak hanya dapat tetap bergerak dalam ilmu-ilmu agama Islam, tetapi juga dapat bergerak dalam ilmu-ilmu umum. Berkat perubahan itu, di UIN Jakarta misalnya, selain fakultas-fakultas 'agama', juga terdapat Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), terakhir sekali bahkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Adanya fakultas-fakultas umum itu—di samping fakultas-fakultas agama eks IAIN—menghasilkan perkembangan yang dalam istilah saya adalah *beyond imagination*, tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kini, anak-anak santri bisa menjadi ahli ekonomi, ahli teknologi, ahli kedokteran, ahli politik, dan seterusnya. Dan, umat-bangsa ini jelas memerlukan tidak hanya lulusan yang menguasai tafsir, hadis, kalam, fikih, dan seterusnya, tetapi juga tamatan yang menguasai bidang-bidang semacam sains-teknologi, kedokteran, farmasi, kesehatan masyarakat, dan seterusnya.

Lebih jauh lagi, tidak hanya merupakan perluasan mandat, kehadiran UIN memungkinkan terjadinya 'reintegrasi' di antara ilmu-ilmu yang bersumber dari ayat-ayat Qur'aniyah pada satu pihak dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari ayat-

Jurnal Utama

ayat kaunyah pada pihak lain. Sudah terlalu lama—persisnya sejak masa pasca-Baghdad—terjadi dikhotomi yang tajam di antara kedua bentuk ayat-ayat Ilahiyah ini. Akibatnya sudah jelas, umat Islam tertinggal dalam ilmu-ilmu kaunyah dibandingkan bangsa-bangsa lain. Padahal, kesempurnaan pengamalan Islam tidak hanya memerlukan ilmu-ilmu Qur'aniyyah, tetapi juga ilmu-ilmu kaunyah. Kesejahteraan dunia umat Islam tidak mungkin bisa dicapai dengan baik tanpa penguasaan atas ilmu-ilmu kaunyah.

Karena itu, baik secara epistemologis maupun realitas dan praksis kehidupan Islam dan umat Muslimin, reintegrasi ilmu-ilmu Qur'aniyyah dan kaunyah merupakan keharusan sejarah dan sekaligus kebutuhan yang mendesak. Menunda reintegrasi itu hanyalah melestarikan keterpinggiran dan kekalahan umat-bangsa.

Lebih daripada itu, perwujudan UIN merupakan tahap lebih lanjut dari pengarusutamaan (*mainstreaming*) lembaga pendidikan tinggi Islam. Pengarusutamaan itu sebenarnya telah dimulai ketika dalam UU Sisdiknas 1999, madrasah diakui dan dinyatakan sebagai ekuivalen dengan sekolah umum. Dari segi ini, kemunculan UIN merupakan konsekuensi logis dari *mainstreaming* yang sudah berlangsung pada tingkat madrasah.

Dengan *mainstreaming* pendidikan tinggi Islam, terbukalah peluang bagi UIN untuk berkompetisi dengan perguruan tinggi lain di tanahair; tidak hanya untuk mencapai ekspektasi keunggulan akademis, tetapi juga sekaligus ekspektasi sosial—harapan masyarakat luas agar PTAIN dapat memainkan peranan lebih luas dan kontribusi lebih besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Peluang ke arah itu kini terbuka lebar; banyak tergantung pada sivitas akademika UIN untuk secara lebih serius mengubah tantangan dan harapan itu menjadi peluang dan kenyataan. Salah satunya, seperti sering dikemukakan Prof Dr A Malik Fadjar, ketika menjabat Mendiknas, mengubah mental 'institut' menjadi mental universitas.

Marjinalisasi IAIN?

Saya agak lama merenungkan pernyataan Menteri Agama Muhammad M Basyuni pada pelantikan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang 15 Juni 2007 yang kemudian ia ulang dari waktu sampai akhir masa tugasnya pada Oktober 2009. Dalam kesempatan itu Menag menegaskan, Depag—kini Kemenag, menghentikan rencana perubahan IAIN menjadi UIN. Sampai sekarang sudah ada 6 UIN yang sebelumnya adalah 5 IAIN dan satu STAIN. “Mumpung belum berubah, saya stop dulu. Selama saya masih menjabat, tidak akan ada [lagi IAIN] yang berubah status [menjadi UIN]”, ujar Menteri.

Alasan Menag menghentikan perubahan IAIN-IAIN lain menjadi UIN, bahwa setelah menjadi UIN, fakultas agama menjadi tertinggal. “Semua mau menjadi dokter, insinyur, dan sebagainya. Tidak ada yang mau menjadi kiyai”, katanya. Menag di sini agaknya mengacu kepada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang ada di UIN Jakarta; dan Fakultas-fakultas Sains dan Teknologi yang ada di seluruh UIN.

Alasan-alasan Menag menghentikan perubahan ini menarik dikaji. Bahwa kian banyak anak pesantren dan Madrasah Aliyah yang ingin menjadi dokter, insinyur dan sebagainya, tentu sangat sah; dan sepatutnya tidak ada yang menyesali apalagi menghalangi. Bukan hanya karena bidang-bidang ini lebih menjanjikan dalam hal lapangan kerja, tapi juga karena memang umat, bangsa, dan negara masih membutuhkan lulusan-lulusan dalam bidang-bidang tersebut. Lagi pula, sudah saatnya kian banyak lulusan madrasah dan pesantren yang kelak bergerak dalam bidang-bidang strategis ini. Apalagi, cukup banyak lembaga dan organisasi Islam yang memiliki klinik, rumah sakit, dan sebagainya yang membutuhkan lulusan seperti itu.

Sekali lagi, pokok keprihatinan Menag adalah ‘tertinggalnya’ fakultas-fakultas agama, atau persis program studi (prodi) agama, semacam Prodi Tafsir-Hadis, Akhwaliyyah, Prodi Bahasa Arab, dan seterusnya. Tertinggal dalam hal apa? Saya kira, tertinggal dalam segi jumlah peminat. Pada IAIN/UIN Jakarta dan Yogyakarta yang memiliki sumber-



daya pengajar terbaik, penurunan minat itu mungkin dapat dikatakan minimal. Tapi bagi banyak IAIN dan STAIN penurunan minat itu dalam beberapa tahun terakhir terlihat cukup kentara. Sementara pada pihak lain, fakultas-fakultas/prodi baru di dalam struktur UIN, seperti Psikologi, Ekonomi, Sains dan Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Agrobisnis, dan sebagainya terus meningkat peminatnya dari tahun ke tahun.

Penurunan minat dan jumlah *input* pada fakultas-fakultas/prodi-prodi agama hemat saya hampir tidak ada hubungannya dengan perubahan IAIN/STAIN menjadi UIN. Penurunan itu bersumber setidaknya pada tiga hal:

Pertama, pergeseran motivasi menempuh pendidikan tinggi; dari semata-mata menuntut ilmu sebagaimana diajarkan Islam menjadi lebih berorientasi ke lapangan kerja. Sampai akhir 1970-an *input* yang masuk IAIN (ketika itu belum ada STAIN yang terbentuk pada 1998; dan UIN sejak 2002), terutama untuk menuntut ilmu belaka, tanpa berpikir banyak tentang pekerjaan setelah tamat kuliah. Tetapi perubahan sosial-ekonomi sejak 1980-an, kian memperkuat motivasi memasuki bidang yang lebih jelas kesesuaiannya dengan lapangan kerja yang tersedia.

Kedua, perubahan-perubahan signifikan pada kebijakan pendidikan nasional secara keseluruhan. UU Sisdiknas 1989 dan 2003 yang menjadikan madrasah sebagai 'sekolah umum' bercirikan Islam, memunculkan berbagai jurusan umum pada Madrasah Aliyah, seperti IPA, IPS, bahasa, dan keterampilan. Bahkan jurusan-jurusan inilah yang sangat dominan pada MA umumnya, termasuk MA yang ada di lingkungan pesantren sekalipun.

Ironisnya, MA jurusan/program studi/konsentrasi keagamaan yang juga pernah disebut sebagai MA PK (Program Khusus Keagamaan) yang pertama kali didirikan Menteri Agama Munawir Sjadzali kian sedikit. Akibatnya sudah bisa diduga. Sejak 1997 ketika MA mulai menghasilkan lulusan sesuai Kurikulum Diknas 1994, lulusan-lulusan tersebut mayoritasnya adalah lulusan 'sekolah umum', yang tidak ada

sambungannya di IAIN dan kemudian juga STAIN. Sementara lulusan MA Keagamaan sangat sedikit, jauh daripada memadai untuk bisa mengisi demikian banyak kursi yang tersedia pada berbagai prodi keagamaan di IAIN, STAIN, dan kemudian juga fakultas agama di UIN.

Ketiga, munculnya kebijakan Depag sendiri yang berimplikasi pada kian berkurangnya sumber input bagi IAIN/STAIN khususnya. Tidak ada misalnya kebijakan afirmatif guna mendorong lebih banyak MA Keagamaan, yang dapat memperbanyak potensi *input* bagi prodi-prodi agama di IAIN/STAIN dan fakultas-fakultas agama pada UIN. Kalangan pejabat tinggi Depag menyatakan, MA Keagamaan tidak tercantum dalam UU Sisdiknas. Karena itu, Ditjen Pendidikan Islam mengeluarkan kebijakan *phasing out* MA Keagamaan, dengan tidak boleh lagi menerima murid. Akibatnya bisa dibayangkan; kian tidak ada lulusan MA yang memiliki latar belakang ilmu agama memadai untuk memasuki IAIN/STAIN/fakultas-fakultas/prodi-prodi agama UIN. Akibat akhirnya, jumlah mahasiswa IAIN/STAIN kian berkurang, yang bahkan akhirnya dapat membuat mereka tidak bisa lagi *survive*.

Membangkitkan Kembali

Karena itu, jika kita ingin IAIN/STAIN dan fakultas-fakultas dan prodi-prodi agama UIN tidak marjinal, yang diperlukan bukan kebijakan menghentikan perubahan IAIN menjadi UIN, tapi kebijakan khusus yang mendorong kian tersedianya potensi *input* bagi mereka. Ini tidak bisa lain, kecuali membangkitkan kembali MA keagamaan dan pesantren *tafaqquh fi al-din*, yang berkonsentrasi dalam bidang keagamaan.

Sedangkan untuk menghasilkan calon-calon kiyai, gagasan Menag sendiri untuk membentuk '*mahad 'alī*', pesantren tinggi, di beberapa UIN dan IAIN seyogyanya dapat diwujudkan sebagai kebijakan afirmatif. Jika semua ini bisa dilakukan, eksistensi UIN tidak lagi perlu disesali, tapi justru disyukuri karena membuka peluang lebih besar bagi anak-anak umat-bangsa. □

JW/IDRIS THAHA



UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tinggal Empat Tahun Lagi ...

Tanpa hari tanpa berubah dan berkembang. Mulai dari kualitas akademik sumber daya manusia, bangunan, karya ilmiah, dan hasil penelitian. Termasuk pula memperkuat kerjasama.



JWELLY AFRIANI

SORE SETELAH SALAT ASAR, pada Rabu, 21 September lalu. Ratusan mahasiswa membludak di Auditorium Prof Dr Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mereka mendengarkan kuliah umum mantan wakil presiden dan ketua umum Partai Golkar, M Jusuf Kalla, bertema “Kepemimpinan dan Demokrasi”.

Ceramah ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu salah satu rangkaian “Lecture Series on Democracy” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta, yang dirancang 12 kali pertemuan selama setahun. Beberapa tokoh telah mengisi acara tersebut. Antara lain, Wakil Presiden Prof Dr Boediono, MEC, mantan Presiden/Wakil Presiden Prof Dr BJ Habibie, dan ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr M Mahfud MD.

FISIP adalah fakultas ke-11 di lingkungan UIN Jakarta yang diresmikan pada Sabtu, 27 Juni 2009. Lahirnya FISIP awalnya merupakan program UIN Jakarta untuk menata program studi. Saat itu, Prodi Hubungan Internasional (HI) berada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS)—kini Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Prodi Pemikiran Politik Islam (PPI) dan Prodi Sosiologi Agama (SA) di Fakultas Ushuluddin (FU). Di beberapa perguruan tinggi, prodi-prodi itu berada di naungan FISIP, bukan di FEB dan FU seperti di UIN Jakarta.

Sukses pendirian FISIP mengikuti keberhasilan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)—fakultas ke-10 di UIN Jakarta. Lima tahun sebelum FISIP berdiri, FKIK telah memulai menerima mahasiswa baru. Sampai tahun akademik 2010/2011, FKIK menampung 1.053 mahasiswa. Jumlah yang sangat fantastis.

Sebagian besar mahasiswa FKIK itu berasal dari santri-santri pondok pesantren. Mereka mendapatkan Beasiswa Santri Jadi Dokter dari Kementerian Agama (Kemenag) yang berjalan sejak 2005. Dari tahun ke tahun jumlah penerima beasiswa ini terus meningkat. Pada 2009, misalnya, jumlah santri yang diterima 45 orang. Sebelumnya, secara berturut-turut sejak 2005; angkatan pertama 12 orang, kedua 15 orang, ketiga 29 orang, keempat 40 orang.

Kedua fakultas—FKIK dan FISIP, itu merupakan konsekuensi logis dari perubahan institusi IAIN menjadi UIN. Itu bermula dari pemberian mandat yang lebih luas kepada IAIN Jakarta (*IAIN with Wider Mandate*) pada 1998, sejumlah prodi mulai dibuka seperti Prodi Psikologi, Pendidikan Matematika, Prodi Ekonomi, dan Prodi Perbankan Islam. Dua tahun berikutnya, pada 2000, dibuka Prodi Agribisnis, Teknik Informatika, Manajemen, dan Akuntansi. Pada 2001, Prodi Psikologi ditingkatkan menjadi fakultas, dan berdiri pula Fakultas Dirasat Islamiyah, buah kerjasama dengan Universitas al-Azhar, Kairo.

Pada 2002, IAIN berganti nama menjadi UIN. Transformasi ini masih menyisakan sejumlah persoalan. Misalnya, adanya beberapa prodi yang tumpang tindih. Salah satu penataan itu pun akhirnya melahirkan FISIP. Nomenklatur juga dirapikan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), misalnya, lebih tepat dengan nama Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDIKOM). Begitu pula Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) berubah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat berubah Fakultas Ushuluddin.

Perubahan nomenklatur didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, untuk memberikan kepastian kepada mahasiswa sehingga ilmu yang dipelajari mahasiswa sesuai dengan apa

yang terjadi di luar universitas. *Kedua*, untuk efisiensi dalam berbagai bidang.

Pembangunan sarana dan prasarana pun tak terelakkan. Berasal dari dana Islamic Development Bank (IDB), didirikan empat gedung perkuliahan; gedung FTIK, gedung FSH dan FAH, gedung FU dan FIDIKOM, gedung FEB dan FST. Gedung-gedung perkuliahan itu berlantai tujuh. Gedung laboratorium juga dibangun dengan lima lantai. Pusat pelatihan enam lantai, pusat bahasa, student center, poliklinik, dan sarana perlengkapan seperti sarana pembelajaran, komputer, laboratorium MIPA, pangan, macro teaching dan studio, peralatan perpustakaan, peralatan pusat bahasa, peralatan poliklinik, generator, dan sarana pendukung lainnya.

Gedung FKIK juga dibangun dengan bantuan dana pinjaman Jepang. Gedung auditorium utama berdiri megah. Kementerian Agama juga membangun gedung perpustakaan utama yang terdiri dari tiga lantai dilengkapi dengan audio visual dan teleconference. Pemerintah DKI Jakarta ikut memberikan bantuan membangun gedung perkantoran Kopertais dan gedung serbagunanya. Juga menyumbangkan dua unit gedung pesantren mahasiswa dan mahasiswi lengkap dengan gedung serbaguna.

Bantuan dana pembangunan infrastruktur juga datang dari negeri ginseng. Itulah gedung Pusat TIK Nasional, Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Nasional (*National Information & Communication Technology Center*), sebuah pusat pelatihan tentang teknologi informasi yang dibangun atas kerjasama Kementerian Komunikasi dan Korea Selatan dengan UIN Jakarta.

Kerjasama memang menjadi katakunci di balik perkembangan yang begitu pesat di UIN Jakarta. Selain dengan beberapa institusi tersebut, UIN Jakarta menjalin dengan beberapa universitas. Sedikitnya 25 universitas di berbagai benua yang bekerjasama dengan UIN Jakarta. Kerjasama dengan lembaga luar negeri sedikitnya ada 19.

Perkembangan itu diikuti juga pengembangan sumber daya manusia. Untuk mencapai 500 Universitas Top di Dunia pada 2015, UIN Jakarta berusaha memenuhi syarat 80 persen dari tenaga pengajarnya minimal bergelar doktor. Demi mencapai target itu, pihaknya melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan memberikan beasiswa untuk studi lanjut, baik di dalam maupun di luar negeri.

Menurut data dari Lembaga Pusat Jaminan Mutu (LPJM), UIN Jakarta kini memiliki 750 orang tenaga akademik. Menurut data dari Bagian Kepegawaian UIN Jakarta, jumlah profesor pada 2007 58 gurubesar, pada 2008 ada 61 gurubesar, dan bertambah menjadi 63 gurubesar pada 2009. Sedangkan untuk dosen bergelar doktor ada 132 orang pada 2007, pada 2008 122 orang, kemudian mengalami peningkatan pada 2009 menjadi 167 orang.

Kualitas akademik yang juga menjadi

perhatian UIN Jakarta adalah penelitian, baik dalam bidang ekonomi dan sosial, sains dan teknologi, pendidikan, psikologi, kedokteran, maupun ilmu kesehatan. Ada beberapa lembaga penelitian di UIN Jakarta. Di antaranya adalah Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), Pusat Studi Wanita (PSW), dan tentu saja Lembaga Penelitian (Lemlit).

Lembaga-lembaga penelitian ini diharapkan dapat memperkuat orientasi riset kompetitif di tingkat internasional. Tahun 2008 saja jumlah dana riset yang digelontorkan 1,2 miliar. Pada 2009, angka ini meningkat menjadi 2,4 miliar. Namun, pada 2010, dana riset yang berasal dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) menurun menjadi 768 juta rupiah. Pertanyaannya, bagaimana UIN Jakarta mau bersaing di tingkat internasional bila dana anggaran penelitiannya menurun drastis. Penurunan dana penelitian ini tentu saja akan berpengaruh terhadap jumlah hasil penelitian.

Dengan dana tersebut, tentu saja jumlah hasil penelitian ilmiah di lingkungan UIN Jakarta mengalami penurunan. Pada 2005 penelitian yang dihasilkan 36 buah, dan pada 2006, 2007, 2008, dan 2009 masing-masing 40, 48, 62, dan 68 buah. Namun, pada 2010 jumlah penelitian menurun lebih dari setengah daripada tahun sebelumnya.

Bagaimana dengan kualitas jurnal ilmiahnya? Saat ini, UIN Jakarta memiliki 30-an jurnal yang terbit berasal dari prodi, fakultas, pusat studi, dan universitas. Hanya *Studi Islamika* yang diterbitkan PPIM UIN Jakarta yang terakreditasi A. Selebihnya, tidak satu pun jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan universitas memperoleh akreditasi di tingkat nasional, apalagi di tingkat internasional. Termasuk pula minimnya penerbitan buku karya ilmiah dosen UIN Jakarta yang dapat dijadikan rujukan bagi kalangan akademisi. Inilah tantangan berat bagi UIN Jakarta ke depan.

Dalam dua periode ini, sejak berubah, UIN Jakarta dipimpin oleh alumni IAIN; Prof Dr Azyumardi Azra, MA dan Prof Dr Komaruddin Hidayat menjadi rektor. Mereka telah bertekad mencapai target UIN Jakarta menuju *world class university* pada 2015. Setidaknya, mulai tahun ini, masih ada waktu empat tahun bagi UIN Jakarta untuk mempersiapkan keperluan dan membenahi kebutuhan-kebutuhan demi terpenuhinya syarat-syarat menuju peringkat *world class university*. □ IDRIS THAHA

JW/DOK UIN JAKARTA



Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Prof Dr Komaruddin Hidayat

Langkah Menjadi Pusat Peradaban

JW/IDRIS THAHA



ENAM UIN BELUM CUKUP. Sebagai pusat peradaban, perguruan Islam negeri ini diharapkan mampu mencetak santri-santri mandiri. Banyak langkah untuk mencapai cita-cita ini.

Apa yang Anda bayangkan mengenai enam UIN di Indonesia?

Salah satu peran UIN adalah untuk menjaga dan mengawetkan (*to preserve*) warisan tradisi agama dan budaya bangsa. Lebih dari itu, UIN juga dirancang sebagai pusat penelitian untuk memproduksi ilmu baru yang diperlukan masyarakat. Tak kalah pentingnya, UIN adalah tempat penyemaian calon pemimpin umat dan bangsa. Saya bayangkan ke depan UIN ini akan menjadi mitra strategis dan konstruktif untuk mengembangkan daerah sekitar masing-masing dalam berbagai bidang pembangunan.

UIN bisa menjadi pusat peradaban?

Setiap bangsa dan masyarakat memiliki warisan dan bangunan kebudayaan yang dijaga dan diwariskan secara turun temurun. Indonesia dengan mayoritas warganya beragama Islam, tentu saja peradaban Islam mesti tumbuh di negeri ini. Pusat kritik dan pengembangan kebudayaan dan peradaban adalah dunia pendidikan. Bahkan bisa dikatakan bahwa buah akhir dari sebuah pendidikan adalah membudayakan masyarakatnya. Dan puncak-puncak kebudayaan sering disebut peradaban. Jadi, saya bayangkan UIN mestinya menjadi komunitas penjaga dan pencinta peradaban. Oleh karena itu di kampus mana pun dijauhkan dari permainan politik praktis, karena cenderung merongrong kultur kampus sebagai pusat keilmuan dan peradaban. Kampus bukan *civitas politica*, tetapi *civitas academica*. Berkumpulnya ratusan intelektual dan ribuan mahasiswa merupakan potensi dan pilar peradaban sebuah bangsa.

Bagaimana seharusnya hubungan UIN dengan dunia luar dirinya?

Universitas sekarang ini merupakan miniatur masyarakat dunia yang kian plural. Berbagai cabang ilmu klasik maupun moderen bertemu. Berbagai ilmu-

wan lintas disiplin, lintas bangsa, lintas universitas dan lintas agama bertemu saling berdialog baik melalui forum seminar langsung maupun melalui media sosial internet. Universitas yang mengisolasi dari pergaulan internasional akan terkucilkan dan ketinggalan dari percaturan keilmuan. Sejauh ini ada kerjasama UIN dengan lembaga perguruan tinggi asing, ada yang bersifat kelembagaan, kerjasama penelitian dan ada yang sifatnya pribadi-pribadi antara sesama intelektual.

Saya senang sekarang semakin berdatangan dosen-dosen muda UIN yang tamat dari tugas belajar di luar negeri, dari universitas yang prestigius dengan bidang kajian yang beragam. Jadi, sesungguhnya istilah globalisasi tidak asing bagi Islam karena sejak awal munculnya Islam sudah berpandangan mondial, rahmat bagi semesta. Penyebaran Islam sekarang ini sangat terbantu dengan munculnya media sosial internet.

Peradaban seperti apa yang Anda bayangkan?

Karena UIN berada di Indonesia, tentu saja yang urgen adalah bagaimana mengembangkan Islam yang secara historis-kultural berakar Indonesia. Semua agama itu ketika keluar dan berkembang dari tempat kelahirannya mengalami pengkayaan kultural yang luar biasa. Agama Yahudi dan Nasrani yang lahir di Timur Tengah setelah berkembang di Barat menjadi sangat kaya dengan warna Barat. Salah satu kekuatan Islam adalah akar dan matrantai historisnya yang solid. Hanya saja, kelemahannya gravitasi alam pikiran ke masa lalu menjadi begitu kuat. Kalau tidak diimbangi dengan inovasi baru dan pandangan ke depan, alam pikiran Islam mengesankan selalu ingin berjalan ke masa lalu.

Karena umat Islam Indonesia tidak memiliki tradisi keislaman yang kuat di masa lalu, aspek positifnya kita tidak memiliki beban sejarah dan leluasa untuk melakukan inovasi dan eksperimen ijtihad keislaman yang cocok untuk Indonesia dan masa depan.

Hadirnya UIN menjadi pengalaman baru di dunia pendidikan Islam di Indonesia. Komentar Anda?

Jangankan bicara UIN. Sebagai sebuah negara, Indonesia ini masih sangat muda. Bahkan yang namanya "bangsa Indonesia" masih dalam proses "menjadi". Saya melihat potensi besar yang bisa dikembangkan agar UIN menjadi kelas dunia. Tetapi kita lebih bersemangat membangun dan membela lembaga partai politik ketimbang memajukan lembaga pendidikan semacam UIN. Pada hal keberadaan UIN itu jangkauannya lintas generasi. Kalau partai politik yang dipikir tiap lima tahunan. Tanpa memiliki perguruan tinggi Islam kelas dunia, ekspresi keislaman Indonesia yang akan menonjol adalah majelis taklim, tabligh akbar, dan politik berebut kekuasaan.

Apa yang ingin Anda katakan dengan perubahan status dari IAIN menjadi UIN?

Ini inovasi dan eksperimen sejarah. Sebuah loncatan luar biasa. Untuk menilai UIN jangan fokus apa yang telah diraih hari ini. Tetapi potensi yang ada serta posisikan UIN dalam perspektif pembangunan bangsa dan memajukan umat yang selama ini sering merasa ditinggalkan oleh negara. Atau sekadar jadi perebutan setiap ada pemilu.

Cukup tidak enam UIN yang ada di Indonesia untuk membangun peradaban yang Anda maksud?

Jelas belum cukup. Tetapi yang ada ini harus memiliki *blue-print* yang jelas agar bagi siapa yang mendukung atau yang mengkritik memiliki argumen yang sah. Selama ini banyak orang hanya menduga-duga, memberi komentar tanpa data dan argumen yang valid. Dalam hal ini pihak Kementerian Agama tidak akurat dan tidak vokal dalam membela dan menjelaskan UIN.

Berapa lama yang dibutuhkan UIN untuk membangun peradaban?

Yang mendesak bukan berapa lama UIN membangun peradaban. Tetapi berapa lama membangun UIN agar benar-benar memenuhi syarat sebagai universitas unggulan. Ini terkait dengan sikap pemerintah dan teman-teman di DPR karena UIN itu milik rakyat dan negara.

Bagaimana Anda memandang keenam UIN yang ada?

Yang saya rasakan, semua UIN yang ada itu dikelola dengan semangat perjuangan untuk memajukan rakyat. Kami memiliki *networking*, saling berbagi pengalaman, bukan *competitor*. Inilah keunikan UIN. Kami ingin mengembangkan Islam sebagai sumber rahmat dan peradaban. UIN bukan lembaga politik. Bukan lembaga ideologi. Namun, masing-masing tengah mencari dan membangun distingsinya.

Apa distingsi UIN Jakarta?

Karena letaknya di ibu kota, alumni UIN banyak yang aktif dalam wacana sosial-politik sehingga hal ini ikut mewarnai citra UIN Jakarta. Lalu, banyak dosen dan alumni yang juga aktif di lembaga sosial dan ormas keagamaan. Fenomena ini juga memperkaya nuansa UIN Jakarta. Kesan saya di Jakarta cukup seimbang dan dinamis antara pemikiran yang dekat dengan tradisi Timur Tengah, Barat, dan Indonesia. Anda bisa menemukan dosen yang mendalam pengetahuannya tentang Islam klasik, Islam di zaman modern, dan pemikiran serta tradisi Islam nusantara. Distingsi lain, dosen dan alumninya dekat dengan media massa.

Bukankah distingsi itu dipengaruhi oleh peran para pemimpinnya? Misalnya, IAIN Jakarta pada saat dipimpin Harun Nasution. Juga, IAIN Yogya saat dipimpin Mukti Ali.

Betul. Karena sistem dan institusi perguruan tinggi Islam negeri seperti IAIN/UIN belum kokoh, maka peran rektor menjadi penting dalam komunikasi sosial. Yang ideal adalah lembaganya, alumninya, dan para profesornya yang lebih populer. Ke depan, rektor itu lebih sebagai manager dan penjaga visi-misi serta melakukan *lobby*.

Menurut Anda, figur seperti siapa yang layak memimpin UIN?

Siapa pun yang memimpin UIN, dia harus rajin belajar. Belajar mengetahui karakter masyarakat. Dia harus mendengarkan perasaan dan aspirasi umat Islam. Dia harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara modern dan negara-bangsa. Bahwa Indonesia tengah berada dalam proses perubahan yang cepat dan dinamis. Nah, bayangkan jika pemimpin UIN tidak memahami peta ini, bisa repot. Saya sendiri selalu belajar dan belajar bagaimana memosisikan diri sebagai rektor UIN. Yang pasti saya berusaha menjaga martabat dan independensi UIN karena UIN bukan sekadar lembaga keilmuan, tetapi menjadi sorotan umat [] IDRISTHAHA

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Aktualisasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi

Membuka fakultas dan prodi baru untuk mewujudkan paradigma integratif-interkoneksi. Berbagai kerjasama terus dijalin. Lembaga dan pusat-pusat kajian juga dibentuk. Termasuk pula mutu akademik diawali.

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA bertransformasi pula menjadi UIN Sunan Kalijaga. Transformasi ini meneguhkan cita-cita UIN Sunan Kalijaga yang ingin menerapkan paradigma keilmuan integratif-interkoneksi yang sudah dirintis di lingkungan kampus tersebut, beberapa tahun sebelum menjadi universitas.

UIN Sunan Kalijaga mencoba merealisasikan paradigma itu melalui perubahan di seluruh aspek kelembagaan akademiknya. Di sisi akademik, misalnya, UIN Sunan Kalijaga membukan beberapa fakultas dan program studi. Fakultas yang dibuka adalah Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora.

FST menawarkan enam program studi dengan empat program studi yang sebelumnya berada di Fakultas Tarbiyah yaitu Program Studi Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Teknik Informatika, Teknik Industri, Pendidikan Matematika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Fisika.

Program Studi Teknik Informatika diarahkan untuk mencetak sarjana yang mampu mengintegrasikan keilmuan teknik informatika dan keislaman serta sosial kemanusiaan. Sedangkan kompetensi inti adalah penguasaan dan penerapan teknologi informasi dalam bidang *decision making, operation* dan *advanced application development*. Fasilitas pembelajarannya meliputi *state of art* dari hasil kemajuan teknologi informasi seperti *fiber optic connection, cyber campus, Wi-Fi, mobile-technology, advance laboratory*, maupun perangkat ITC (*information and communication technology*).

JW/ZAENAL MUTTAQIN

Sementara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora membawahi tiga program studi sekaligus, Ilmu Komunikasi, Sosiologi, dan Psikologi. Dengan visi menciptakan lulusan/sarjana yang unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan studi keislaman, ilmu sosial dan humaniora bagi kemanusiaan, fakultas ini menawarkan kurikulum yang memadukan keislaman dan pengetahuan umum seperti mata kuliah Komunikasi Protetik, Komunikasi dalam al-Quran, dan Komunikasi Politik Islam.

Enam tahun setelah berubah menjadi universitas, total program studi yang dimiliki UIN Sunan Kalijaga mencapai 36 program studi. Masing-masing 33 program studi di tingkat sarjana dan vokasi dan 5 program studi ditawarkan di tingkat magister dan doctoral. Mayoritas program studi yang ditawarkan hingga akhir kepemimpinan Prof Dr M Amin Abdillah berakreditasi A.

Selain itu, sejalan dengan upaya transformasi dan mengakomodasi keinginan agar keberadaan fakultas-fakultasnya lebih visioner, substantif, dan *marketable*, UIN Sunan Kalijaga melakukan perubahan nama empat fakultas yang sudah ada sejak masih menyandang status IAIN. Keempatnya, Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Adab menjadi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Fakultas Tarbiyah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan Fakultas Ushuluddin menjadi Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam.

Untuk mendukung pengembangan akademik yang ditempuhnya, UIN Sunan Kalijaga membentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berwenang melakukan pengendalian dan penjaminan mutu akademik. Lembaga ini bertugas mengawal kualitas mutu akademik yang dikembangkan di kampus tersebut serta mengupgradenya dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, universitas juga membentuk Direktorat Akademik, Kurikulum, dan Kelembagaan yang bertugas melakukan perumusan dan perencanaan program pengembangan akademik, kurikulum dan kelembagaan.

Guna menciptakan perbaikan kinerja akademik ini, UIN Sunan Kalijaga menerapkan prinsip-prinsip *quality assurance* seperti pengukuran Indeks Kinerja Dosen, Standar Operasional Akademik, audit mutu akademik, dan peningkatan indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Setelah



digagas sejak 2006, peningkatan kualitas akademik ini berhasil mendapatkan sertifikasi bergengsi ISO 9001: 2008 dari TUV Rheinland, Jerman tahun 2009.

Tidak berhenti di situ, UIN Yogyakarta juga melakukan perubahan di sisi manajemen menyangkut tata kelola suatu universitas. Terkait ini, UIN Yogyakarta menjadi perguruan tinggi pertama di Indonesia yang mengadopsi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) selain 37 instansi publik yang menerapkannya pada 2007. Dengan status BLU, UIN Sunan Kalijaga memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan baik pendapatan maupun belanjanya.

Untuk memaksimalkan pengembangan akademiknya, UIN juga merintis pengembangan kerjasama dengan tujuan menciptakan implikasi positif bagi pengembangan akademik universitas. Pengembangan kerjasama diperlukan mengingat tuntutan pengembangan akademik UIN juga bertambah luas dibanding masih IAIN, sehingga dibutuhkan partner akademik baik di skala nasional maupun internasional dengan sistem akademik dan kelembagaan yang lebih mapan.

Beberapa capaian penting dalam kerjasama yang dibangun adalah kesepakatan UIN bersama beberapa universitas terkemuka dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, misalnya, UIN Sunan Kalijaga menggandeng Institut Teknologi Bandung dalam kerangka UIN-ITB Partnership dengan fokus pengembangan di bidang sains dan teknologi.

Masih kerjasama, UIN Sunan Kalijaga juga menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) mendirikan program doktoral Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS Yogyakarta) dengan fokus pengembangan studi Islam dalam kerangka dialog, relasi, dan interaksi dengan komunitas agama lain di Indonesia. Sejak dibuka tahun akademik 2007-2008, program yang diluncurkan di UGM ini telah diikuti 54 orang mahasiswa dengan 15 orang di antaranya mahasiswa asing dari berbagai negara seperti Filipina, Mesir, USA, dan China.

Hingga saat ini, Program ICRS berhasil merealisasikan kerjasama dengan beberapa universitas terkemuka dunia seperti Georgetown, Duke, Temple, Columbia, GTU Berkeley dan Hartford Seminary, Monash University, National University of Singapore, dan Capetown University. Manfaat kerjasama ini adalah pengiriman tugas belajar mahasiswa ICRS kepada universitas-universitas tersebut.

Lebih lanjut, UIN juga terus menstimulir terciptanya iklim akademis di dalam lingkungan universitas sendiri. Ini misalnya dilakukan melalui pengembangan program penelitian, publikasi karya ilmiah akademis, pengayaan sumber-sumber literatur, maupun pengembangan pusat-pusat studi.

Untuk penerbitan karya ilmiah misalnya, hingga akhir 2010, jumlah jurnal terakreditasi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga mencapai 23 jurnal seperti Al-Jami'ah, Adabiyat, Thaqaifiyat, Religi, dan Musawa. Jurnal-jurnal ini mempublikasikan ratusan karya ilmiah para dosen di lingkungan universitas. Sedangkan untuk pusat studi, UIN Sunan Kalijaga memiliki sekurangnya sembilan pusat studi seperti Center for Islam and Transformation dan Center for the Study of Religious and Social Diversity.

Pengembangan UIN yang cukup massif sejak beberapa tahun terakhir meningkatkan ekspektasi umat untuk menjadikannya sebagai lembaga pendidikan pilihan. Ini terlihat dengan terus meningkatnya animo calon mahasiswa yang mendaftar ke UIN Sunan Kalijaga dari tahun ke tahun. Tahun 2008 misalnya, jumlah calon mahasiswa pendaftar mencapai 4.770 orang, lalu meningkat dua kali lipat menjadi 8.455 orang di tahun 2009.

Rektor UIN Sunan Kalijaga (2010-2014), Prof Dr Musa Asy'arie, mengungkapkan pengembangan UIN sejak lima tahun terakhir merupakan awal dari pengembangan yang akan dilakukan UIN pada beberapa tahun mendatang. Beberapa rencana program pengembangan akademik dan pembangunan fasilitas sarana prasarana lanjutan mulai dilakukan UIN Sunan Kalijaga.

Di sisi pengembangan akademik, sebut Musa, pihaknya kini tengah memproses izin pendirian beberapa fakultas dan program studi. Selain Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN juga berencana membuka Fakultas Ekonomi dan Keuangan Islam dengan program studi yang ditawarkan Manajemen, Akuntansi, dan Keuangan Syariah. Diharapkan beberapa program studi sudah bisa dibuka pada pendaftaran tahun depan.

Di sisi lain, UIN Sunan Kalijaga tengah mencari strategi pembiayaan beasiswa kuliah bagi mahasiswa, terutama dari latar belakang ekonomi menengah bawah. Terkait hal itu, universitas bakal mengupayakan sumber-sumber pendanaan baik dari beasiswa pemerintah, swasta, maupun penerimaan dari pengembangan bisnis yang dikembangkan UIN.

Dari sisi pengembangan kerjasama kelembagaan, Pembantu Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan, Prof. Dr. Siswanto Masyhuri, mengungkapkan UIN Sunan Kalijaga akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan implikasi positif atas pengembangan akademik UIN Sunan Kalijaga. Ini misalnya dilakukan dengan menggandeng universitas-universitas terkemuka baik di Timur Tengah, Asia, Eropa, AS, dan Australia.

Pengembangan kerjasama, tutur Siswanto, dibutuhkan mengingat UIN Sunan Kalijaga memiliki agenda pengembangan dan pendirian beberapa fakultas umum seperti Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta Fakultas Ekonomi. Dengan begitu, kerjasama diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal bagi pengembangan kurikulum fakultas-fakultas tersebut. [] ZAENAL MUTTAQIN



JW/ZAENAL MUTTAQIN

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Prof Dr Musa Asy'arie, MA.

Agar Tetap Milik Rakyat



JW/ZAENAL MUTTAQIN

BERUSAHA BERTAHAN MENJADI KAMPUS 'milik rakyat'. Namun, tidak serta-merta kualitas akademik dinomorduakan. Kontrol pengawasan yang ketat atas kualitas pengajaran tetap menjadi nomor satu.

Apa misi pengembangan yang ingin Anda lakukan di kampus ini?

UIN Sunan Kalijaga merupakan kampus rakyat. Untuk itu, hal pertama yang penting adalah menerapkan biaya SPP yang bisa terjangkau oleh mahasiswa dari berbagai kalangan. Upaya ini kita lakukan agar sebagian besar generasi kita, terutama calon mahasiswa dari kelompok tidak mampu, tetap bisa belajar sampai ke jenjang paling tinggi. Sebab bayangkan saja, siapa yang akan memikirkan anak-anak dari latar belakang keluarga miskin pada saat biaya kuliah di kampus lain sudah begitu mahal

Mekanismenya bagaimana?

Problem ini bisa kita pecahkan dengan mencarikan pembiayaan agar mereka mendapatkan pendidikan dengan gratis. Kalau kita hitung, biaya kuliah mahasiswa sebenarnya sangat

kecil. Taruhlah misalnya SPP seorang mahasiswa Rp 600 ribu dalam satu semester. Kalau setahun, berarti SPP-nya Rp 1,2 juta per mahasiswa. Lalu dikalikan biaya SPP setahun Rp 1,2 juta dengan jumlah mahasiswa kita sekitar 14 ribu, maka hasilnya sekitar Rp 16,8 miliar. Itu angka SPP mereka. Jelas, sangat kecil.

Karena itu, pikiran saya, bagaimana bisa kita atasi hal itu dengan mencarikan misalnya *funding*, kerjasama, beasiswa, dan dana dari sumber-sumber lain yang memungkinkan perolehan. Dengan fungsi Badan Layanan Umum (BLU), kita memiliki fleksibilitas pendanaan agar bisa menolong mahasiswa-mahasiswa dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Sebab siapa yang akan memikirkan mereka, kalau bukan kita.

Ada upaya lain?

Saya ingin kita juga mampu membangun kemampuan mereka menjadi enterprenuer. Sebab, ini akan membantu mereka menyelesaikan problem paling fundamental, yaitu kemiskinan.

Kita sekarang sedang merintis pendirian semacam lembaga usaha. Upaya ini sudah mulai kita realisasikan dengan melakukan kerjasama. Semua ini kita lakukan dengan harapan semangat enterprenuership bisa terbangun dalam diri mahasiswa sejak dini.

Kita kuatkan jaringan agar kreativitas mahasiswa juga bisa tersalurkan, sehingga mereka sampai ke tahap mandiri. Saya cukup kaget, ternyata kreativitas mahasiswa di sini luar biasa.

Kalau dilihat data alumni-alumni UIN, mayoritas jadi enterprenuer, kalau tidak menjadi guru. Tidak banyak lulusan memasuki kelas birokrat atau kelas elit bangsa. Meski sebetulnya enterprenuer juga bisa jadi elit bangsa.

Untuk tahun ini dan ke depan?

Tahun 2011 ini merupakan tahun pertama. Selain dengan perubahan, kita juga gandeng beberapa bank BUMN. Selain itu, kita mau coba lakukan pengembangan usaha. UIN memiliki unit usaha komersial seperti perhotelan (UIN Yogyakarta memiliki hotel bernama University Hotel di Yogyakarta). Hari ini kita sedang studi banding, bagaimana kita membuat Perseroan Terbatas (PT) di UIN ini.

Nantinya, melalui PT ini, kita kembangkan menjadi bapak angkat bagi enterprenuer mahasiswa-mahasiswi UIN ini. Sebab saya sadari, mereka itu tinggi semangatnya, tapi jaringan yang mewadahnya tidak ada. Jadi istilahnya kita dorong mereka jadi pengusaha, lalu kita carikan akses jaringannya, baik jaringan pasar maupun jaringan permodalan. Nah itu juga yang coba kita upayakan.

Pengembangan bisnis PT-nya seperti apa? Apa sektor bisnis yang akan dibidik?

Banyak hal. Sebagai contoh, UIN itu kan punya hotel. Kalau sudah punya PT, hotel bisa langsung dikelola secara profesional. Peluangnya sangat besar. Cuma bagaimana SDM yang menanganinya. Ini yang sedang kita upayakan.

Antara cita-cita pendidikan gratis dengan output enterprenuership ini bisa dicapai kapan?

Kita akan mulai memberikan pendidikan gratis untuk calon mahasiswa pendaftaran tahun akademik 2012. Beasiswanya kita berikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang betul-betul membutuhkan atau berasal dari kalangan ekonomi menengah bawah dan berprestasi. Sebab mereka ini yang harus ditolong.

Memang, sekarang sudah ada. Tapi ketentuannya, beasiswa baru bisa diberikan setelah mereka lulus menjadi mahasiswa UIN. Nah, kalau tahun 2012, diberikan bahkan sebelum dia jadi mahasiswa UIN. Jadi begitu dia mendaftar, dia terbukti kurang mampu, dia diberi keringanan biaya. Kalau selama ini, daftar dulu, setelah lulus, baru dicarikan beasiswa.

Pengembangan pada aspek lain, program akademik misalnya?

Sekarang kita tengah memproses pengajuan izin pendirian beberapa program studi. Untuk fakultas, tahun ini kita akan mengajukan pembukaan Fakultas Ekonomi dan Keuangan Islam. Alhamdulillah, usulan ini sudah disetujui Senat Universitas. Kita dirikan karena tuntutan kebutuhan umat.

Di mana lokasinya?

Sri Sultan Hamengkubuwono XI menawarkan kepada kami agar pengembangan Kampus II UIN Sunan Kali-

jaga dibangun di kawasan di mana Kerajaan Islam pertama berdiri, yaitu Plered. Nah Plered itu yang ditawarkan Sultan kepada kami. Kami merasa, wah ini wangsit (apresiatif). Itu kan lokasi pendirian kerajaan Islam Mataram di Jawa. Ini ada apa? Ini pasti menyangkut historisitas. Nah sekarang, kami sedang dalam proses bagaimana mewujudkan ini. Karena itu Sultan yang menawarkan, mudah-mudahan lancar prosesnya.

Apa evaluasi Anda terhadap keberadaan UIN? Benarkah sedemikian buruknya dukungan kementerian atas pengembangan UIN?

Kalau saya melihatnya itu sebagai bagian dari carut-marutnya birokrasi negeri ini. Bagaimana tidak carut-marutnya, di negeri ini ada 30 kementerian dan 40 komisi yang semestinya bubar ketika sudah ada kementerian. Tapi kan nyatanya tidak.

Apakah Anda pernah merasakan, misalnya, minimnya dukungan Kemendiknas terhadap program studi umum?

Nah itu tergantung kalau dibandingkan dengan siapa. Taruhlah kita bandingkan UIN dan UGM, ya jauhlah. Jadi harus jelas perbandingannya. Coba misalnya kita bandingkan UIN Yogya dengan Universitas Islam Makassar. Belum tentu kita kalah.

Apa komentar Anda terhadap RUU PT? Apa efeknya bagi UIN?

UIN akan tetap hidup, bahkan meski manajemennya tidur. Artinya ada tidak ada RUU PT, UIN tidak ada masalah. *Lha* tidur aja manajemennya, UIN masih bisa jalan. Sebetulnya, semua itu tinggal maunya para elit bagaimana. Kita yang di bawah ini diuyek-uyek saja. Ada DPR dan MPR juga kan hanya seremonial saja. Apa itu betul-betul penting?

Berarti tidak ada masalah dengan RUU PT?

Saya sih, pada akhirnya, tidak ada masalah. Sebab nanti negara juga yang akan menanggungnya. Bagi orang-orang tertentu, barangkali bisa jadi masalah. Buat pemimpin-pemimpin tertentu mungkin jadi masalah. Tapi bagi institusi negeri yang didanai APBN, tidak masalah. *Lha* sudah dijamin APBN. Problem besar kecil anggaran, ya tergantung orangnya. Bagi yang kurang terus, dikasih berapa pun pasti kurang.

Dengan pencapaian saat ini, bagaimana prospek UIN ke depan?

Menurut saya, UIN ke depan, memiliki peluang cerah. Bayangkan Anda punya anak, ditanya anakmu besok mau bagaimana? Jawabannya pasti; pintar dan saleh. Pasti itu. Lantas kalau jawabannya demikian, siapa yang bisa memberikannya. Pasti UIN. Tidak ada kerisauan tentang masa depan UIN. Kalau masa depan, sudahlah cukup.

Yang penting sekarang, bagaimana kita bisa menyusun program dan perencanaan dengan baik. Kalau kita *enggak* punya program dan perencanaan yang jelas, manajemen awut-awutanan, bagaimana bisa membawa UIN ke depan. Kita juga harus terus memperbaiki manajemen, perencanaan, dan juga kultur. Kultur terutama menyangkut bagaimana insan akademis UIN menjadi insan yang produktif.[]

ZAENAL MUTTAQIN

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Memadukan Ma'had dan Universitas

Dari sekolah berubah menjadi universitas. Mensintesakan dua tradisi kelembagaan yang berbeda. Hasilnya pun memuaskan. Lebih dari 90-an judul buku baru diterbitkan setiap tahunnya.

PULUHAN FOTO UKURAN 10 RS dipasang di atas skatsel pameran yang berjajar rapi di gedung Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Senin-Rabu, 3-5 Oktober lalu. Foto-foto yang dipamerkan anggota muda angkatan ke-12 UKM Jhepret Club itu merekam beberapa aktivitas manusia, arsitektur, panorama pegunungan, hingga kreasi dari foto *still life* yang membuat kesan pameran menjadi lebih beraneka ragam.

Pameran bertajuk "12.00 am" ini salah satu kegiatan kreatif di UIN Malang, Jawa Timur. Pameran itu sangat mungkin terwujud setelah status "sekolah" berubah menjadi universitas. Banyak kegiatan akademik yang lahir dari perubahan status itu.

STAIN Malang memang telah berubah, dan perubahan statusnya didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 pada 21 Juni 2004. Perubahan ini mensintesakan antara tradisi pesantren yang menekankan pembelajaran tentang Islam dengan ilmu pengetahuan umum dan aplikatif seperti fisika, psikologi, sains dan teknologi. Realisasinya adalah menjadikan sistem pesantren tinggi (*ma'had 'aliy*) dengan universitas sebagai satu kesatuan.

Sistem pendidikan yang mengharuskan setiap mahasiswa baru tinggal di *ma'had 'aliy* sebenarnya telah dirintis pada 1998—sebelum UIN Malang berdiri. Pada awalnya, kewajiban ini hanya berlangsung pada saat mahasiswa masih berada pada tahun pertama dan kedua periode perkuliahannya. Ini karena keterbatasan daya tampung asrama.

Selain mempelajari keilmuan dasar Islam, para mahasiswa yang tinggal di *ma'had 'aliy* juga ditempa amaliah keagamaannya secara lebih intensif, seperti membiasakan mahasiswa salat berjamaah, membaca al-Quran, dan puasa senin-kamis. Hal lain yang ditekankan bagi mahasiswa adalah penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai alat utama dalam memahami literatur keislaman dan ilmu pengetahuan.

Rektor UIN Malang Prof Dr Imam Suprayogo menilai keberadaan *ma'had 'aliy* salah satu dari sembilan bagian yang harus ada di dalam lingkungan UIN (*arkanul jami'ah*). Delapan bagian lainnya adalah adanya profesor atau gurubesar yang memiliki keahlian di bidangnya, masjid atau fasilitas ibadah, perpustakaan, laboratorium, pusat kajian/ruang kelas, pusat pelayanan seluruh warga universitas, pusat pengembangan seni dan budaya, dan sumber pendanaan yang kuat dan berkelanjutan. "Kalau tidak ada *ma'had*, UIN belum lengkap," papar Imam.

Hingga saat ini, sudah tujuh angkatan mahasiswa yang berhasil diwisuda dari program *ma'had 'aliy*. Imam menilai program tersebut cukup memberikan hasil positif bagi kualitas lulusan UIN Malang. Selain memiliki hafalan al-Quran dan pemahaman dasar keagamaan, para alumni *ma'had* juga memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan yang diteliti seperti biologi, fisika, matematika, dan psikologi.

Sebagai sebuah perguruan tinggi Islam negeri, UIN Malang mengembangkan tradisi keilmuan yang memungkinkan para sarjana lulusannya memiliki *skill* saat memasuki dunia kerja dengan pembukaan fakultas dan program pas-

casarjana yang dibutuhkan masyarakat. Saat ini, UIN Malang memiliki enam fakultas dan program pascasarjana yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Humaniora dan Budaya, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Sains dan Teknologi.

Dengan fakultas-fakultas itu, UIN Malang menawarkan sejumlah program studi/jurusan. Di antaranya Jurusan Pendidikan Agama Islam, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah; Jurusan al-Akhwāl al-Syakhshiyah dan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah; Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris dan Jurusan Pendidikan bahasa Arab di Fakultas Humaniora dan Budaya;



JW/DOK

Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi; Jurusan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, dan Teknik Arsitektur di Fakultas Sains dan Teknologi.

UIN Malang juga tengah merintis pembukaan fakultas lain. Misalnya, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, dan Fakultas Kelautan dan Perikanan. Dasar penambahan adalah tingginya tingkat kebutuhan sarjana lulusan ketiga fakultas tersebut. Saat ini, UIN Malang mengupayakan penyediaan lahan untuk pembangunan gedung fakultas dan sarana praktik perkuliahan mahasiswa.

Dengan format pendidikan yang mensintesakan tradisi pesantren dan universitas, UIN Malang mencita-citakan lahirnya lulusan sarjana dengan figur ulama yang intelek profesional atau intelek profesional yang ulama. Figur ini memiliki tingkat kedalaman spiritual keagamaan, keagungan dan kehalusan akhlak, keluasan penguasaan ilmu, dan kematangan profesional.

Sintesa dua tradisi menjadi satu kesatuan berangkat dari pemikiran epistemologis bahwa ilmu pengetahuan bersumber dari ayat-ayat *qawliyyah* yaitu al-Qur'an dan hadis maupun ayat-ayat *kauniyyah* yakni sumber ilmu yang diperoleh melalui proses observasi, eksperimen, dan penalaran logis sekaligus. Dengan demikian, pelbagai disiplin ilmu yang didapatkan dari dua sumber ini bukan merupakan dua hal yang dikotomis, melainkan sebagai satu kesatuan.

Sintesa ini semakin ditegaskan pasca transformasi dari STAIN Malang menjadi UIN Malang. Transformasi ini memungkinkan UIN Malang menyelenggarakan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam dan integrasi antarilmu agama dan ilmu-ilmu umum.

Dalam visi yang digariskannya, UIN bercita-cita menjadi universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

Menurut Imam terdapat sejumlah besar program yang akan ditempuh secara simultan untuk menciptakan UIN Malang sebagai kampus yang kokoh dan maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Islam. Program pertama adalah pengembangan kelembagaan dengan mendirikan sejumlah fakultas dan peningkatan akreditasi kualitasnya, serta mengubah statusnya sebagai Badan Layanan Umum sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan

dan pengembangan pendanaan. Terkait program ini, UIN Malang berencana membentuk *holding company* dalam menopang aktivitas pendidikannya.

Program selanjutnya, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung perkantoran, ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, gedung pertemuan, asrama mahasiswa, dan gedung olahraga. Terkait pengembangan program ini, UIN Malang direncanakan menambah areal lahan. Apalagi UIN Malang juga berencana menambah Fakultas Pertanian dan Peternakan serta Fakultas Kelautan dan Perikanan yang membutuhkan areal praktikum yang luas.

Program lainnya adalah pengembangan akademik dengan prioritas penguatan sumber daya manusia, baik dosen, laboran, maupun tenaga administratif. Khusus pengembangan dosen, selain untuk mengejar pemenuhan kuantitas juga dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitasnya melalui penugasan studi lanjutan ke tingkat magister dan doktoral. Saat ini, UIN Malang memiliki 86 dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dari berbagai bidang keahlian/keilmuan.

Program akademik juga dilakukan dengan pengembangan sistem pengajaran dan pembentukan pusat-pusat kajian dan publikasi karya ilmiah. Terkait ini, UIN Malang mengembangkan Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) dan Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI) guna menghasilkan kemampuan berbahasa bagi dosen dan mahasiswa. UIN Malang juga mendirikan Lembaga Kajian Al-Quran dan Sains yang secara khusus mencari format dan kajian terus-menerus guna menghasilkan konstruksi keilmuan yang integratif dengan bersumber dari ayat-ayat *qawliyyah* yakni al-Quran dan hadits sekaligus bersumber dari ayat-ayat kauniyyah yaitu hasil observasi, eksperimen dan penalaran logis.

Program lain yang ditekankan dalam proses transformasi UIN adalah pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Untuk mendukung kegiatan pengembangan, UIN Malang mengalokasikan anggaran yang terus meningkat setiap tahun. Hitungan tahun 2008, nilai dana penelitian mencapai Rp 950 juta, naik dari Rp 650 juta tahun 2006 dan Rp 420 juta tahun 2005. Berdasar dukungan ini, tidak kurang dari 80-90 judul buku baru diterbitkan para dosen/peneliti UIN Malang setiap tahunnya. Belakangan, program ini dikembangkan hingga ke tingkat mahasiswa.

Beberapa program lainnya adalah peningkatan kerjasama, kemahasiswaan, dan pembangunan karakter akademik dan etika. Seluruh program dirancang untuk mendukung pencapaian visi misi UIN Malang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan Keislaman saat ini dan mendatang. □

ZAENAL MUTTAQIN



Rektor UIN Maliki Malang
Prof Dr Imam Suprayogo, M.Pd

Memperluas Studi Keislaman



JW/DOK

BILA TIDAK BERUBAH, Islam menjadi sempit dan miskin. Nantinya, mahasiswa tidak dibebani uang kuliah. Kategorisasi dalam RUU Pendidikan Tinggi sangat mengganggu. UIN tidak pas dimasukkan ke dalam kategori Perguruan Tinggi Khusus.

Perubahannya melompat, dari sekolah tinggi menjadi universitas. Mengapa?

Memang, ada pertanyaan mengapa harus menjadi universitas, bukan menjadi IAIN dulu, karena kami sebelumnya masih berupa STAIN? Bagi kami, untuk apa menjadi IAIN? Sebab IAIN sendiri semestinya harus berubah menjadi UIN. Apalagi tidak ada ketentuan STAIN harus menjadi IAIN dulu baru kemudian jadi universitas. Katakan misalnya Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, atau Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, mereka langsung jadi universitas.

Ada alasan teologisnya?

Islam memiliki dimensi luas, bukan semata ritual. Islam memiliki lima misi besar, yaitu ilmu pengetahuan, membangun manusia unggul, menciptakan tatanan sosial yang adil, ritual keagamaan sendiri, dan bekerja berdasar ilmu pengetahuan dan profesionalisme. Dan untuk mencapai itu, tidak mungkin ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Kalau ada dikotomi, maka pengertian Islam akan menjadi tereduksi.

Al-Quran menekankan luasnya pengertian Islam tentang

ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam Islam itu bukan hanya ushuludin, syariah, dakwah, adab, dan tarbiyah. Kalau pengertian tentang ilmu Islam hanya sebatas itu, maka Islam akan tereduksi. Islam yang universal tidak akan terwadahi dalam wadah yang mampu menampung universalitas Islam itu.

Perubahan itu dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi umat?

Perubahan menjadi universitas adalah keharusan. Bukan ditakutkan. Justru yang perlu ditakutkan adalah kalau STAIN atau IAIN tidak berubah menjadi universitas, Islam akan

menjadi demikian sempit dan miskin. Karena itu betapa-pun sulitnya mengubah STAIN Malang menjadi UIN, tetap kami lakukan.

Perubahan menjadi UIN juga bukan satu hal yang ditakutkan bakal mendangkalkan pengajaran agama (Islam). Sebab tanpa ada universitas pun, pengajaran ilmu agama saat ini sudah dangkal. Justru dengan menjadi universitas, pengajaran agama yang sudah dangkal, kita kembangkan kembali.

Apa prinsip yang melandasi paradigma keilmuan yang dikembangkan UIN Malang?

Landasan epistemologis yang kami usung adalah bahwa al-Quran harus dijadikan sebagai sumber ilmu. Dalam Islam dikenal ayat *kawunyah* dan *qawliyah*. Ayat *kawunyah* atau *qawliyah* yang digunakan secara bersama-sama itu ada di perguruan tinggi Islam. Jadi kalau hanya membuka Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran, tapi tidak ada pemahaman tentang Quran, maka pemahaman lulusannya akan sangat dangkal, bahkan apa bedanya dengan lulusan universitas lain. Tidak ada ciri khasnya.

Apa saja langkah-langkah UIN selama beberapa tahun ini?

Sekarang sudah ada enam fakultas *plus* Program Pascasarjana. Ke depan saya ingin mendirikan Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran. Sekarang kami sudah menyiapkan lahan 100 hektar di Batu Malang. Itu dari sisi kelembagaan. Setelah itu kami ingin membangun Fakultas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan. Sebab Indonesia itu neg-

ara agraris. Rencananya fakultas ini akan didirikan di Malang Selatan, dengan perkiraan kebutuhan lahan 1.000 hektar. Secara kelembagaan, memang kami ingin menambah jumlah fakultas, tapi saya tidak ingin terlalu cepat. Saya hanya ingin prosesnya berjalan dengan memperhatikan kualitas.

Bagaimana dengan pendirian *ma'had 'aly*?

Agar pola pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan berjalan seperti diharapkan, maka format pengajaran kita rancang dengan memadukan antara *ma'had 'aly* (pesantren tinggi mahasiswa) dan universitas. Keberadaan *ma'had 'aly* adalah keharusan juga keniscayaan. Sehingga kemudian tidak semata-mata mencetak lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran tapi tidak paham al-Quran.

Apa saja yang mendukung ide-ide Anda?

Di UIN ada beberapa unsur pendukung yang harus terpenuhi dalam mendukung kegiatan akademisnya. Saya merumuskannya sebagai *'arkan al-jami'ah*. Di UIN Malang, ada sembilan rukun universitas, yaitu harus ada profesor atau gurubesar yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, mesjid sebagai sarana ibadah, *ma'had* sebagai tempat untuk menempa pemahaman dan pembelajaran pengamalan ajaran agama, perpustakaan, laboratorium yang mendukung kajian berbagai macam disiplin ilmu, pusat kajian/ruang kuliah, pusat pelayanan seluruh warga kampus, pusat pengembangan seni dan olahraga, dan sumber pendanaan yang kuat.

Rencana ke depan bagaimana?

Ke depan kami mencita-citakan, bagaimana mahasiswa yang kuliah di sini tidak dibebani uang kuliah. Karena itu kami sedang merintis pembangunan *holding company* dengan berbagai macam usaha. Katakan misalnya UIN memiliki 5.000 hektar lahan terus ditanami pohon produktif seperti sengon, maka ada potensi keuntungan sekitar 400 milyar uang yang bisa kita hasilkan setahun. Angka ini cukup memadai dalam pembiayaan mahasiswa.

Ada rujukannya?

Merujuk Universitas al-Azhar, Mesir, ada dua keunggulan yang mereka miliki, yaitu banyak profesor dan kemandirian finansial. Dua hal ini bisa kita lakukan. Hal pertama, tiga tahun lalu, kita merekrut 35 calon mahasiswa yang hafal al-Quran. Kita beri beasiswa. Tahun kedua dan ketiga, kita juga merekrut calon mahasiswa masing-masing 35 orang. Kita beri mereka beasiswa kuliah lulus S1. Bila prestasi akademisnya bagus, mereka kita sekolahkan lagi hingga ke level master dan doktor. Bila akhlaknya mulia, pemahaman keagamaannya bagus, dan indeks akademisnya bagus, kita angkat menjadi dosen. Perkiraan saya, dalam 15 tahun mendatang UIN Malang akan memiliki 200 lebih orang doktor yang mendukung proses pendidikan di sini.

Bagaimana dari sisi finansial?

Kita sudah merintis pembelian 1.000 hektar lahan untuk usaha di sektor pertanian dan perkebunan. Pendapatannya akan kita gunakan untuk pembiayaan kuliah para mahasiswa. Bila berjalan lancar, maka dalam tujuh sampai delapan tahun ke depan, UIN Malang tidak harus mengambil uang SPP dari mahasiswa, tapi diambil langsung dari pendapatan usaha seperti demikian. Sebab harus kita sadari, hal yang pal-

ing pertama dan sangat serius dihadapi mahasiswa adalah beratnya pembiayaan.

Secara akademis, apa yang akan menjadi konsentrasi pengajaran UIN Malang?

Prinsipnya kan integrasi. Semua disiplin ilmu kita kembangkan tanpa pembedaan. Hal ini karena UIN memiliki tujuan menciptakan ulama yang intelek profesional atau intelek profesional yang ulama dengan memiliki empat kekuatan, yaitu kedalaman spiritual, keagungan dan kehalusan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Empat hal ini yang ingin kami kembangkan dalam berbagai macam disiplin ilmu.

Apa evaluasi Anda terhadap perubahan status selama ini?

Pertama, satu hal yang belum dan masih ingin kami lakukan adalah membebaskan seluruh biaya pendidikan terhadap siapapun yang belajar di UIN Malang. Insya Allah, kita sudah mulai merintis upaya ke arah sana dengan pembentukan *holding company* dengan fokus usaha di berbagai lini bisnis.

Kedua, kalau berbicara tentang *policy* di tingkat pusat, Kementerian Agama masih agak lamban dalam memahami perubahan STAIN/IAIN menjadi UIN. Mungkin, itu akibat mereka belum terbiasa berpikir tentang universitas. Umumnya, mereka berpikir tentang perguruan tinggi agama Islam sebatas IAIN. Sehingga ketika berbicara tentang akreditasi dan biaya untuk penelitian ilmiah, pengabdian masyarakat, berpikirnya masih sebatas di lingkup Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin, dan Fakultas Dakwah. Padahal fakultas di UIN bukan hanya itu.

Apa yang Anda inginkan dari Kementerian Agama?

Semestinya Kementerian Agama, ketika sudah memiliki UIN, saat berbicara tentang penelitian *ya* penelitiannya tentang biologi, fisika, psikologi. Semuanya diprioritaskan. Apalagi kebutuhan pendanaan penelitian di fakultas demikian cukup besar. Nah itu yang belum dipikirkan. Jadi Kemenag seringkali belum begitu tepat untuk berpikir tentang pengembangan universitas.

Apa tanggapan Anda terhadap RUU Pendidikan Tinggi yang sedang digodok DPR?

Bagi UIN tidak ada masalah dengan RUU PT. Syaratnya, RUU PT tidak melakukan kategorisasi berupa Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Negeri Khusus. Kalau itu ada, itu akan sangat mengganggu. Kalau UIN dimasukkan ke dalam kategori Perguruan Tinggi Negeri Khusus, maka sesungguhnya tidak pas.

Kalau posisinya diletakkan sebagai PTN Khusus, maka studi keilmuan akan menjadi miskin, tereduksi. Sekali lagi, andaikan kategorisasi Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Khusus tidak ada, tidak ada problem bagi UIN.

Bagaimana prospek dan peran UIN di masa depan?

UIN saat ini dan mendatang akan melakukan perubahan yang luar biasa bagi umat Islam di Indonesia. Nantinya, umat Islam tidak hanya berpikir soal ritual keagamaan, melainkan juga berpikir tentang ilmu pengetahuan, tentang kualitas manusia unggul, tentang keahlian, berpikir tentang profesionalisme. □ ZAENAL MUTTAQIN

UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru

Butuh Ahli Pertanian dan Peternakan

Hanya empat fakultas saat berstatus institut. Empat fakultas tambahannya ketika berubah menjadi universitas. Membuka fakultas yang sejalan dengan masalah umat.

AULA UIN SULTAN SYARIF KASIM (SUSKA) Pekanbaru, Riau, itu disesaki ratusan sivitas akademika—mahasiswa, dosen, dekan, dan para pembantu rektor. Di pagi Senin akhir September itu, mereka mengikuti studium general yang disampaikan Bupati Rokan Hilir H Annas Maamun. Sang Bupati menyampaikan ceramah bertema “Membangun Daerah Berbasis Budaya Lokal Melayu Islami di Kabupaten Rokan Hilir”.

Annas memaparkan dalam ceramahnya, mahasiswa hendaknya dapat melakukan kegiatan yang positif sesuai dengan nilai-nilai budaya Melayu, dan tidak menerapkan nilai budaya luar yang bisa menimbulkan kontroversi—pro dan kontra. “Gunakan etika dan tata krama yang baik,” kata Annas menjelaskan.

Mengakhiri ceramahnya, Annas memberi bantuan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Dan, se usai ceramah, Annas mewakili pemerintah sebagai Bupati Rokan Hilir dan Prof Dr H M Nazir mewakili sivitas akademik sebagai Rektor UIN Suska menandatangani nota kesepahaman dalam bidang pengembangan akademik.

Kerjasama dengan Pemda Rokan Hilir bukanlah hal baru dan bukan satu-satunya kerjasama bagi UIN Pekanbaru. Dalam agenda akademiknya, UIN Suska Riau telah menjalin dan melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi dalam dan luar negeri, lembaga/instansi pemerintah, dan badan usaha/industri serta lembaga swadaya masyarakat. Kerjasama ini untuk lebih mendorong pengembangan pelaksanaan program di bidang tri dharma perguruan tinggi.

Meningkatkan semangat kerjasama bagi UIN Pekanbaru itu dimulai setelah status kelembagaan perguruan tinggi Islam negeri di wilayah Indonesia barat ini berubah. Perubahan status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim—yang kemudian dikenal dengan UIN Suska Pekanbaru, Riau, ini diresmikan Presiden RI, Dr Susilo Bambang Yudhoyono, pada 9 Februari 2005.

Pengukuhan status ini secara resmi didasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 Tanggal 4 Januari 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tindak lanjut perubahan status ini, Menteri Agama RI menetapkan Organisasi dan Tata kerja UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 Tanggal 4 April 2005.

Pendidikan tinggi Islam di bawah naungan negara ini sebenarnya didirikan pada 19 September 1970. Dasarnya, Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.



JW/IDRIS THAHA

194 Tahun 1970, yang diresmikan berdirinya oleh Menteri Agama KH Ahmad Dahlan. Dengan demikian, status institut disandanginya selama 35 tahun.

Pada mulanya, IAIN Suska hanya memiliki tiga fakultas; Tarbiyah, Syariah, dan Ushuluddin. Pada 1998, IAIN Suska menambah satu fakultas; Fakultas Dakwah. Fakultas bungsu pada saat berstatus institut ini pada awalnya Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin. Setahun sebelumnya (1997), IAIN Suska telah mendirikan Program Pascasarjana.

Itu berarti, selama 28 tahun, IAIN Suska memiliki empat fakultas dan satu program pascasarjana. Dan kini, setelah statusnya berubah, ada empat fakultas tambahan. Selain Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FSIH), Fakultas Ushuluddin (FU), dan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK), juga ada Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Fakultas Psikologi (FPsi), Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS), dan Fakultas Pertanian dan Peternakan (FAPERTAPET). Pendirian fakultas-fakultas ini didasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005. Dengan demikian, UIN Suska memiliki delapan fakultas:

Di delapan fakultas itu terdapat 516 dosen tetap, 444 dosen tidak tetap. Mereka yang berpendidikan S1 42 orang, S2 434 orang, dan berpendidikan S3 40 orang. Di antara mereka terdapat 15 orang bergelar gurubesar.

Dengan jumlah dosen itu, mereka mengajar di seluruh fakultas. Antara lain, di FTK dengan mahasiswa 5.377

orang, di FSIH dengan 2.673 mahasiswa, di FU jumlah mahasiswanya 381 orang, di FDIK yang memiliki 1.334 mahasiswa, di FEIS yang menampung 2.562 mahasiswa, di FPs dengan mahasiswa 862 orang, dan di FAPERTAPET dengan mahasiswa 2.841 orang.

Pengembangan bidang akademik itu tidak lepas dari pengembangan bidang fisik, sarana, dan prasarana. Kampus UIN Suska menempati lahan 84,15 hektar. Kampus baru di Km. 15 Jalan Soebrantas Simpangbaru Panam Pekanbaru, dengan lahan 80,50 hektar. Sisanya (3,65 hektar) di kampus lama, di Jalan KH Ahmad Dahlan. Pembangunan fisik dilahan ini dimulai pada tahun akademik 1995/1996 dan telah berhasil membangun gedung seluas 5.760 m² untuk 70 lokal ruang kuliah.

Senin, 18 September 2010, infrastruktur pembangunan gedung UIN Suska itu diresmikan Menteri Agama Suryadharma Ali. Ia berharap, peresmian gedung UIN Suska bisa menjadi langkah mengawali gerak pembangunan nasional yang berbasiskan Islam. UIN bersama umat harus saling berinteraksi agar berbagai pemecahan masalah dapat diselesaikan secara baik.

“Ahli-ahli pertanian dan peternakan sangat dibutuhkan saat ini. Sudah selayaknya kita tidak bergantung lagi pada pasokan bahan pangan yang bermuara pada label impor,” kata ketua umum Partai Persatuan Pembangunan itu.

Salah satu persoalan umat Islam memang pertanian. Sektor riil ini berpotensi menghasilkan keuntungan dan mampu memberikan dukungan positif meskipun di masa krisis ekonomi. Indonesia adalah negara agraris dengan luas lahan dan iklim yang sangat tepat untuk pengembangan pertanian. Indonesia memiliki banyak potensi pertanian untuk kesejahteraan umat.

Persoalan umat ini direspon positif oleh UIN Suska, dengan mendirikan Fakultas Pertanian dan Peternakan (FAPERTAPET), yang belum dimiliki lima UIN lainnya. Fakultas kedelapan ini didirikan pada 2002 dengan nama awal Fakultas Peternakan. Sejak 2006, Fakultas Peternakan berubah nama menjadi Fakultas Pertanian dan Peternakan (FAPERTAPET) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2006.

Saat ini FAPERTAPET telah memiliki dua Program Studi (Prodi); Prodi Peternakan dan Prodi Pertanian. Prodi Peternakan dibuka pada Tahun Akademik 2002/2003 dan telah memiliki tiga konsentrasi, yaitu: Teknologi Produksi Ternak (TPT), Teknologi Hasil Ternak (THT), Teknologi Pakan dan Nutrisi (TPN). Program Studi Pertanian dibuka pada Tahun Akademik 2007/2008, yang rencananya enam konsentrasi; Teknologi Hasil Pertanian (THP), Komunikasi Perta-

nian (KP), Agronomi (AGR), Agribisnis (AGB), Perkebunan dan Hama Penyakit Tumbuhan (HPT).

Prodi dan konsentrasi ini dilengkapi pula beberapa laboratorium. Antara lain, Laboratorium Biologi Reproduksi, Laboratorium Agrostologi dan Agronomi, Laboratorium Non Ruminansia, Laboratorium Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi, Laboratorium Ruminansia, Laboratorium Teknologi Pasca Panen, Laboratorium Sosial Ekonomi, Laboratorium Genetika dan Pemuliaan, dan Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Kimia.

Banyak aktivitas pertanian yang bisa dilakukan. Misalnya, pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, bahkan kehutanan. Kegiatan-kegiatan ini berpotensi menghasilkan produk yang laku dijual. Aset-aset negara yang mendukung pertanian seyogianya dapat diberdayakan untuk mengembangkan teknologi pertanian modern yang berwawasan lingkungan.

FAPERTAPET memiliki 36 orang dosen, 13 orang staf administrasi, dan seorang laboran mahasiswa. Sejak 2006 hingga kini, FAPERTAPET telah meluluskan 137 alumni. Mereka dituntut mampu menciptakan kreativitas, karya, dan produk pertanian yang bernilai tinggi.

Lain halnya dengan Fakultas Sains dan Teknologi, yang didirikan pada akhir 2001. Cikal bakal fakultas bermula dari dibukanya Jurusan Teknik Informatika pada 1999 dan Jurusan Teknik Industri pada 2001—keduanya di bawah naungan Fakultas Dakwah. Pada 2002, dibentuk Jurusan Sistem Informasi dan Jurusan Matematika Terapan. Pada 2003 dibentuk Jurusan Teknik Elektro dengan Prodi Teknik Elektronika dan Teknik Telekomunikasi. Semua itu merespon kebutuhan dunia usaha dan industri, khususnya di Propinsi Riau, serta dalam rangka mengantisipasi pengaruh globalisasi dunia.

Mengenai Fakultas Psikologi diawali dengan berdirinya Prodi Psikologi di Fakultas Tarbiyah pada 1998. Dan, terhitung pada 11 Mei 2002, manajemen dan administrasi Prodi Psikologi dipisahkan dari Fakultas Tarbiyah, dengan membentuk perangkat organisasi Fakultas Psikologi. Peminat fakultas ini meningkat secara signifikan.

Lahirnya Fakultas Ekonomi dan Sosial (FES) tidak jauh berbeda dengan tiga fakultas lainnya. Diawalinya dengan pembentukan Jurusan Manajemen dan Manajemen Perusahaan di Fakultas Syariah pada tahun akademik 1998/1999. Pada tahun akademik 2002/2003 status Jurusan Manajemen dan Manajemen Perusahaan ditingkatkan menjadi Fakultas Ekonomi dengan Jurusan/Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen Perusahaan Diploma III.

Nomenklatur Fakultas Ekonomi pun kemudian diubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Sosial. pada 2007 ada penambahan penyelenggaraan prodi, yaitu: Administrasi Perpajakan (D-III), Akuntansi (D-III), dan Manajemen Perusahaan (D-III).

Fakultas-fakultas yang didirikan di UIN Suska Pekanbaru memang untuk menjawab persoalan yang dihadapi umum. Termasuk yang diharapkan Bupati Rokan Hilir saat menyampaikan ceramahnya di hadapan sivitas akademik UIN Suska September lalu. □ IDRIS THAHA (PEKANBARU)

JW/IDRIS THAHA



**Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru
Prof Dr M Nazir**

Idealnya di bawah Satu Kementerian

BERUSAHA MENGEMBALIKAN “ilmu islami”. Ada istilah yang tidak tepat di dalam RUU PT, dan karenanya harus dihapus. Mendirikan fakultas yang berbeda dari UIN-UIN lain.

Apa yang mendasari perubahan IAIN menjadi UIN Pekanbaru?

Ada beberapa pertimbangan. Di antaranya, karena perkembangan filosofis, demografis, dan sosiologis. Yang paling utama berkaitan dengan filosofis. Kita menyadari pentingnya perubahan yang mendasar tentang epistemologi ilmu pengetahuan dan kaitannya dengan pendidikan. Karena selama ini telah terjadi dualisme sistem pendidikan akibat dari dikhotomi ilmu agama dan ilmu umum. Kita menginginkan bagaimana menyatukan sistem pendidikan dengan menghilangkan dikhotomi ilmu pengetahuan. Ini sangat berarti dan fundamental. Faktor penting kedua berkaitan dengan demografis dan sosiologis. Riau kan daerah negeri Melayu, yang identik dengan Islam. Jadi kemelayuan ini tidak bisa tidak harus dibangkitkan kembali.

Apa yang Anda maksud dengan penghilangan dikhotomi itu?

Kita mengembalikan ilmu pengetahuan kepada paradigma islami. Terintegrasinya ilmu dengan Islam. Tidak ada lagi penyebutan ekonomi, misalnya, sebagai ilmu saja. Itu ilmu islami. Termasuk pertanian atau teknik. Sama statusnya dengan syariah, ushuluddin, tarbiyah, dakwah, dan lainnya. Itu semua adalah ilmu islami. Kita tidak lagi menyebutkan ini ilmu umum dan itu ilmu agama. Semua dalam satu tatanan keilmuan yang namanya ilmu islami. Jadi itu yang kita sebut dengan integrasi ilmu dan Islam. Ya, *wihdatul ilmi*.

Bagaimana mewujudkan ilmu islami itu secara akademik?

Harus diakui, ini tidak mudah. Sangat sulit. Sebenarnya ini problem besar karena kita belum bisa mencetak orang seperti Ibnu Sina. Dosen-dosen kita masih terpilah keahliannya. Namun secara berangsur kita mentraining dosen-dosen umum untuk membekali kemampuan keagamaannya. Dosen agama juga demikian.

Kita punya konsep IDI atau Ilmu Dalam Islam. Semua ilmu itu berangkat dari al-Quran dan al-Sunnah. Juga dari alam semesta yang bisa dicapai dari riset-riset.



JW/IDRIS THAHA

Bagaimana Anda merealisasikan konsep IDI di UIN?

Kita sedang mengajak semua dosen untuk menulis buku-buku dasar. Ini membutuhkan waktu yang lama. Langkah awalnya, kita memberikan basic kompetensi Islam kepada mahasiswa-mahasiswa pada semester awal.

Referensi dari luar bisa kita ambil. Ilmu kan tidak monopoli. Kalau sesuai dengan Sunnatullah, walaupun datangnya dari orang kafir, ilmu itu kan tidak ada masalah. Terutama ilmu eksak dan ilmu sosial. Itu juga lumayan sulit.

Wujud realiasi konsep itu seperti apa.

Konsep kita kan asrama. Masalahnya, asramanya masih untuk sebagian mahasiswa. Modelnya seperti itu. Dulu, semua UIN sudah mengarah ke model asrama ini. Di UIN Malang, model ini sudah berjalan. UIN Jakarta sudah punya asrama, tapi belum menampung semua mahasiswa di tahun pertama.

Apakah ada usaha dari enam UIN di Indonesia untuk membicarakan bersama mengenai konsep reintegrasi keilmuan itu.

Sering. Kita menggelar forum untuk menghasilkan konsep yang dapat diterapkan dan dijadikan acuan bersama. Banyak masalah yang kita bahas. Kita sudah bahas dalam beberapa pertemuan. Mengenai masalah konsep reintegrasi, kita sudah membicarakannya pada dua-tiga kali pertemuan.

Kita sepakat dengan istilah yang berbeda-beda. Ada istilah reintegrasi dan interkoneksi. Bahkan, lambangnya berbeda-beda. UIN Malang, misalnya, menggambarkan integrasi keilmuan itu dengan gambar pohon. UIN Yogya dengan gambar sarang laba-laba. UIN Pekanbaru dengan gambar spiral-andromeda. Intinya tauhid sebagai sumbu pengembangan ilmu. Semua ilmu tidak boleh lepas dari tauhid. Ilmu

berkembang terus dengan kendali tauhid. Itu yang kita sebut ilmu islami. Titik temunya bahwa Islam itu luas. Semua ilmu itu sebenarnya milik Islam.

Ada hambatan untuk mewujudkan konsep ilmu islami itu?

Dalam konteks Indonesia, kesulitan itu jelas sekali. Secara substansial, perubahan IAIN menjadi UIN itu adalah bentuk *wihdatul ilmi*. Usaha integrasi telah berlangsung. Namun, secara struktural, kita berada di dua kelembagaan. Selama ini, UIN di bawah Kementerian Agama, dan secara akademik dibina Kementerian Pendidikan Nasional. Memang begitu struktur negara kita. Ya, mau tidak mau, kita harus menerima. Saya rasa, yang positif-lah yang kita ambil. Yang menjadi persoalan berkaitan dengan manajerial. Satu lembaga diantur dua manajer. Karena itu, kita minta agar dua Kementerian meramu kesepahaman agar dapat mengayomi. Walaupun dua Kementerian, tapi dengan satu sistem kan tidak masalah.

Secara administratif, apakah ada problem?

Idealnya memang kita di bawah satu Kementerian. Kita merasakan bagaimana memproses kenaikan pangkat yang harus melalui dua Kementerian.

Soal paling penting, ya berkaitan dengan pembagian dana. Porsi dana UIN dari Kemenag jauh bedanya dengan Kemendiknas. Dana-dana hibah penelitian yang diberikan Kemenag jauh lebih kecil dibandingkan dana penelitian dari Kemendiknas. Kenapa tidak disamakan budgetnya.

Apakah mungkin UIN akan mendapatkan dana besar bila bergabung dengan Kemendiknas?

Sebenarnya Kemenag tinggal mengadopsi dana yang dikururkan Kemendiknas. Atau, dana itu dibincangkan bersama antara Kemenag dan Kemendiknas.

Anda pasti sudah membaca RUU Pendidikan Tinggi. Apa komentar Anda?

Ada beberapa istilah yang tidak tepat di dalam RUU PT itu. Misalnya, PTN Khusus. Dalam RUU PT disebutkan, PTN Khusus adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan dan dikelola oleh Kementerian lain atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian bersama Kementerian Pendidikan Nasional.

Makanya kita mengajukan usulan agar istilah yang tidak tepat itu diubah. Perlu dirombak kembali. Kita yakin, RUU bisa dirombak. Dalam pertemuan enam UIN di Malang, kita membicarakan istilah PTN Khusus itu. Jadi yang kita sebut mungkin PT Khusus hanya untuk swasta. Semua yang dikelola negara itu adalah pendidikan tinggi (PT). Tidak ada PTN Khusus di situ. Semua pendidikan tinggi dikelola dan dibiayai negara. Itulah yang disebut Pendidikan Tinggi Negeri. Tidak perlu disebut Khusus.

Nah, Kementerian mana yang mengelola PTN itu. Ya, bisa di bawah Kemendiknas. Atau, bisa Kemenag. Atau, bisa Kementerian Dalam Negeri. Bisa pula, Kementerian Kesehatan.

Ada juga PT Swasta. Jadi, kita hanya punya dua PT, yaitu PTN dan PTS. Tidak ada lagi pembagian PTN dibagi menjadi dua; PTN dan PTN Khusus. Jangan didikhotomikan semacam itu.

Siapa yang bertanggung jawab atas semua PT milik

negara?

Koordinator PTN-PTN yang dikelola Kementerian-Kementerian itu tentulah Kemendiknas. Karena itulah, hal ini memang perlu kesepakatan dan kerjasama yang betul-betul baik antar Kementerian-Kementerian yang mengelola PTN.

Jadi, UIN-UIN tetap berinduk ke Kemenag, dan koordinasinya ke Kemendiknas?

Ya, begitu. Ini kan sistem nasional. Kalau masih ada istilah PTN Khusus, maka UIN-UIN yang dikelola Kemenag akan menghasilkan lulusan yang siap menjadi pegawai Kemenag.

Di luar negeri, masalah pendidikan tinggi ini di bawah Kementerian Khusus. Tidak di bawah Kemenag dan tidak juga di bawah Kemendiknas. Namun, berada di Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Sebenarnya akan lebih bagus, pendidikan tinggi ini dikelola Kementerian tersendiri yang digabung dengan riset. Ini dimaksudkan upaya antara perguruan tinggi dan riset betul-betul bersinergi. Selama ini kan tidak ada sinergi dan kolaborasi antar-keduanya. Akibatnya, riset-riset kita tidak berdampak baik. Tidak untuk perkembangan keilmuan. Tidak berdampak baik untuk masyarakat. Untuk usaha juga tidak.

Apa yang harus dilakukan UIN-UIN ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang Anda sebutkan?

Kami tentu berembuk bersama untuk membuat konsep-konsep. Ini perlu dipikirkan, bagaimana konsep-konsep itu kemudian disosialisasikan dan dijelaskan. Ini masalah politik. Walaupun paham, tapi kadang tidak mendukung apa yang kita inginkan.

UIN Pekanbaru sering menggunakan istilah madani, selain ilmu islami. Bisa Anda jelaskan?

Di Riau, kata madani sudah menjadi bahasa Melayu. Menurut penelitian, hampir 70% kosa kata bahasa Melayu itu jadi bahasa Arab. Tentu saja intinya *civil society* juga. Artinya dunia yang beradab, berperadaban, dan berkemajuan. Jadi inklusiflah.

Ada masalah dengan mereka?

Ya. Ini problem cukup besar. Kita mengalihkan dan mengubah habitat dan kultur mereka yang sudah terbentuk sekian lama. Yang jelas, mereka harus menguasai kompetisi dasar Islam. Mereka, misalnya, wajib bisa mengaji al-Quran. Kita tidak akan meluluskan mahasiswa yang tidak pandai baca Quran dengan baik. Mahasiswa wajib menghafal juz amma. Tidak boleh tidak.

Mengapa UIN Pekanbaru mendirikan Fakultas Pertanian dan Peternakan?

Filosofi intinya tentu saja al-Quran. Banyak ayat al-Quran yang berbicara mengenai pertanian dan peternakan. Misalnya, surat kedua dalam al-Quran kan Surat al-Baqarah (Surat Sapi). Selain itu, karena faktor kebutuhan sarjana-sarjana pertanian dan peternakan yang sangat tinggi di Riau dan wilayah Sumatera.

Dulu, ada yang menolak ketika Fakultas Pertanian dan Peternakan dibuka. Ini dianggap menjauh dari cita-cita IAIN. Ketika itu kami menjawab, bahwa "Pekerjaan pertama Nabi kita beternak". Intinya, UIN juga perlu memperhatikan masalah daging, misalnya, yang terkait dengan bidang peternakan. □ IDRIS THAHA (PEKANBARU)

Sunan Gunung Djati Bandung

Terganjai Izin Pendirian Fakultas Baru

Beberapa fakultas baru diajukan izin pendiriannya. Sejumlah syarat belum terpenuhi. Sekurangnya 150-an judul karya ilmiah telah diterbitkan. Bahkan, kini menyiapkan 700 buku untuk diterbitkan.



ANGIN TRANSFORMASI ITU BERHEMBUS kencang ke Kampus Cibiru. Adalah Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 yang ditandatangani pada 10 Oktober 2005 yang mengubah status perguruan tinggi Islam negeri yang berdiri sejak 1967 tersebut menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat.

Substansi dari proses transformasi IAIN Sunan Gunung Djati menjadi UIN setidaknya terangkum dalam visi misi yang ingin dicapai perguruan tinggi Islam tersebut. Visi yang ditegaskan kampus ini adalah menciptakan universitas unggul dan kompetitif yang mampu mengintegrasikan studi-studi keagamaan dengan keilmuan kontemporer berdasar paradigma wahyu memandu ilmu.

Misi yang ingin dicapai UIN Bandung adalah mempersiapkan generasi Ulul Albab yang memiliki kapabilitas untuk memadukan zikir dan pikir dalam kehidupan mereka; memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual; dan, menemukan, mengembangkan, dan mengaplikasikan sains, teknologi, sosial, kebudayaan, dan seni. Sedangkan tujuannya; menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keteguhan iman, kemuliaan akhlak, keluasan ilmu, dan keunggulan amal; mengembangkan penelitian baik ilmu agama maupun umum; menyebarkan ilmu agama dan umum yang digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada praktiknya, upaya transformasi di kampus yang lahir dari inisiatif ulama dan cendekiawan Muslim Jawa Barat,

KH A Muiz, KH R Sudja'i, dan Arthata, ini dilakukan baik di sisi sistem akademik maupun kelembagaan. Dari sisi akademik, transformasi di UIN Bandung ditandai dengan pembukaan sejumlah fakultas baru, penambahan jumlah dosen dengan latar belakang pendidikan yang sesuai kebutuhan, pengembangan kurikulum dan perpustakaan, dan pendekatan pembelajaran. Sedangkan dari sisi kelembagaan, selain peningkatan status menjadi universitas, UIN Bandung mulai merintis pengembangan kerjasama, pusat-pusat studi, laboratorium penelitian pusat penjaminan mutu, termasuk peningkatan kualitas dosen.

Fakultas yang dibuka seiring perubahan status menjadi UIN adalah Fakultas Psikologi dan Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Psikologi menaungi Program Studi Psikologi Sosial, Program Studi Psikologi Industri dan

Organisasi, Psikologi Pendidikan, Psikologi Perkembangan, dan Program Studi Kajian Psikologi Klinis (Fakultas Psikologi). Sedangkan Fakultas Sains dan Teknologi hingga saat ini membawahi enam program studi; Prodi Teknik Informatika, Prodi Teknologi Pertanian, Prodi Matematika, Prodi Biologi, Prodi Fisika, dan Prodi Kimia.

Kini, UIN Bandung memiliki tujuh fakultas. Selain Fakultas Psikologi dan Fakultas Sains dan Teknologi, beberapa fakultas yang dimiliki dan sudah berdiri sejak IAIN berdiri pada 1968 antara lain seperti Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Adab dan Humaniora. Pengembangan juga dilakukan UIN melalui penambahan beberapa program studi di tingkat magister dan doctoral, termasuk vokasi seperti Terjemah Bahasa Inggris dan Manajemen Keuangan Syariah. Total jumlah program studi mencakup program vokasi, sarjana, dan pascasarjana di kampus ini mencapai 51 program studi.

Dari aspek pengembangan kurikulum, UIN Bandung menggandeng beberapa universitas dalam dan luar negeri yang cukup *establish* baik di sisi kelembagaan maupun kurikulum. Beberapa di antaranya menggandeng *Islamic College for Advanced Studies* (ICAS) untuk pengembangan akademik di Fakultas Ushuluddin dan *The International Centre for Education in Islamic Finance* untuk pengembangan Program S-2 Ekonomi Islam. Sedangkan dari sisi buku rujukan, berdasar catatan tahun 2010, perpustakaan UIN Bandung menye-

diakan 113.423 judul.

Selain pembukaan fakultas baru dan peningkatan kualitas kurikulum, pengembangan akademik dilakukan UIN Bandung melalui peningkatan kualitas dosen. Upaya ini dilakukan dengan mendorong para dosen untuk meningkatkan kualifikasi jenjang pendidikan teratas (doktoral) dan posisi akademik tertinggi (gurubesar) guna menunjang aktivitas pengajarannya. Dorongan ini difasilitasi pihak universitas dengan penyediaan fasilitas beasiswa dan jejaring pengembangan kualifikasi studi melalui pembukaan kerjasama seperti Indiana University of Pennsylvania, York of Saint University, Middlesex University, Roehampton University of London, City University of London. Akhir September lalu, UIN Bandung juga menggandeng kerjasama dengan Australian National University dan Monash University.

Hingga saat ini, jumlah tenaga dosen di UIN Bandung mencapai 642 orang dengan kualifikasi jenjang pendidikan doktor 83 orang dan 489 lulusan magister, dan dari jumlah itu 34 bergelar gurubesar dengan keahlian sosiologi agama, filsafat agama, tasawuf, pendidikan, tafsir, dan ilmu komunikasi.

Dari sisi pembelajaran, UIN Bandung menyelenggarakan program *mahad 'aly* (pesantren mahasiswa) sejak dua tahun terakhir. Setiap mahasiswa baru UIN Bandung wajib mengikuti program ini selama satu tahun pertama kuliahnya. Rencananya, pada lima tahun mendatang, semua mahasiswa UIN harus masuk program tersebut.

UIN sendiri tengah mempersiapkan fasilitas *mahad* di Kampus II UIN Bandung yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta Bandung di atas lahan seluas 40 hektar yang bakal menampung semua aktivitas akademik lainnya. Hingga akhir 2010, total jumlah mahasiswa reguler UIN Bandung mencapai 14.187 orang, 406 orang mahasiswa Pascasarjana Magister, 38 orang mahasiswa Pascasarjana S3, 7.626 Program Penyetaraan D-2, dan 610 orang dari Program Penyetaraan D-3.

Transformasi di kampus Cibiru juga dilakukan dengan pendirian dan pengembangan pusat-pusat dan lembaga pendukung yang berfungsi menunjang aktivitas akademis di dalam kampus. Di antaranya, Pusat Penjaminan Mutu yang bertugas memonitor dan mengarahkan kualitas program studi agar selaras dengan visi misi dan tujuan transformasi UIN, Pusat Studi Wanita yang mewadahi aktivitas/kontribusi akademik terkait isu pembelaan hak dan pemberdayaan kelompok masyarakat perempuan, Pusat Informasi dan Islam, Pusat Teknologi Informasi, dan Pusat Kerjasama.

Keberadaan lembaga-lembaga/pusat-pusat studi ini cukup berkontribusi pada peningkatan gairah intelektual di lingkungan kampus. Lembaga Penelitian, misalnya, sebagai wadah penopang tradisi penulisan ilmiah di perguruan tinggi, lembaga ini telah menerbitkan sekurangnya 149 judul karya ilmiah baik dengan metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Lembaga ini juga berperan menstimulir terbitnya 700 buku ilmiah keilmuan Islam dan umum.

Pengembangan ke depan, UIN Bandung memiliki beberapa tahapan. Tahap pertama, 2004-2007, UIN Bandung menargetkan menjadi perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif. Tahap kedua, tahun 2008-2011, UIN Bandung menargetkan makin menegaskan diri sebagai kampus yang unggul dan kompetitif. Tahap ketiga, 2012-2016, UIN Bandung ditargetkan menjadi universitas dengan tradisi riset ilmiah (*research university*) yang kuat. Tahap ini diharapkan menjadi batu loncatan target UIN Bandung selanjutnya sebagai universitas bertaraf internasional (*international university*).

Proses transformasi di semua lini di lingkungan UIN Bandung masih terus dilakukan hingga saat ini. Secara formal kelembagaan, UIN Bandung hingga saat ini masih terus memproses perizinan pembukaan beberapa fakultas seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI.

Rektor UIN Bandung (2006-2011), Prof Dr Nanat Fatah Natsir, MA, mengungkapkan UIN Bandung sudah mengajukan izin pembukaan fakultas-fakultas tersebut sejak hampir tiga tahun lalu. Namun minimnya jumlah dosen dengan spesialisasi matakuliah sesuai program studi masing-masing fakultas membuat perizinan pembukaannya masih belum keluar. Perkiraan Nanat, sepuluh program studi itu membutuhkan 200-an staf pengajar.

Menurut Nanat, untuk menyelesaikan masalah kekurangan tenaga pengajar, pihak UIN Bandung sudah mengajukan perekrutan dosen luar biasa sehingga tidak mengganggu program pengajaran. Namun *beleid* lain tentang persentase 30 persen ilmu pengetahuan umum dan 70 persen ilmu keagamaan di lembaga pendidikan tinggi Islam kembali menjadi ganjalan bagi terbitnya izin pendirian fakultas-fakultas tersebut.

Kondisi demikian, Nanat menilai, membuat proses transformasi yang bergulir di lembaga pendidikan tinggi Islam tersendat. Padahal transformasi merupakan satu hal yang niscaya agar lembaga pendidikan tinggi Islam bisa lebih berperan dalam menjawab kompleksitas problematika umat dalam kerangka modernitas saat ini. "Ini menutupi esensi perubahan status perguruan tinggi agama Islam dari institut menjadi universitas," katanya menyesalkan. □

ZAENAL MUTTAQIN (BANDUNG)



Prof Dr Nanat Fatah Nasir, MS.
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Yang Penting Mengacu ke Standar



JW/ZAENAL MUTTAQIN

CALON MAHASISWA MENINGKAT empat kali lipat. Daya tampung kampus sangat minim. Penyelenggara UIN bisa saja Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama. Harus ada standar nasional yang harus dipatuhi berbagai pihak.

Latar belakang transformasi IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN?

Ada beberapa hal. *Pertama*, secara normatif. Dalam Surat Al Imran ayat 190-191 Allah SWT menegaskan bahwa dalam proses penciptaan langit dan bumi terdapat dorongan agar manusia bisa berpikir selain perintah untuk selalu berzikir. Untuk itu, perlu sistem pendidikan yang tidak mendikotomi antara *fiqr* dan *dzikr*.

Kedua, historis empiris. Proses transformasi dilandasi pada warisan akademis para intelektual pendahulu di dunia Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Khawarizm. Selain memahami agama, mereka juga memiliki keahlian di bidang pengetahuan seperti matematika, sosiologi, humaniora, dan kedokteran. Mereka lahir dari sistem pendidikan yang dikelola tanpa dikhotomi antara ilmu agama dan umum.

Ketiga, tuntutan perubahan zaman. Partisipasi lembaga pendidikan di dunia Islam dituntut bukan *an sich* ayat-ayat *qawliyah*, tapi harus juga ayat-ayat *qawuniyah* agar kontribusi lembaga pendidikan Islam bisa lebih optimal. Kalau normatif saja, bisa ditinggalkan umat.

Langkah apa saja yang ditempuh selama enam tahun terkait transformasi tersebut, baik secara akademik maupun kelembagaan?

Secara epistemologis, kita membangun sumber ilmu pengetahuan, agama dan umum dengan berbagai cabangnya. Untuk itu, sistem pembelajaran perlu dilandaskan prinsip wahyu memandu ilmu. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan di UIN Bandung bernafaskan wahyu.

Aplikasi pendekatan pengajarannya?

Menyangkut metodologi, kita menempuh beberapa pendekatan. Pertama, metodologi pengajaran dengan sistem *team teaching*. Misalnya, untuk mengajar satu obyek kealaman, kita gunakan dua dosen, dosen ahli kimia misalnya dengan dosen tafsir al-Quran. Harapannya, keduanya bisa menyajikan pembahasan obyek ilmiah dengan lebih lengkap baik dari dimensi ilmiah maupun dimensi wahyu.

Kedua, *ma'had al jami'ah* (pesantren mahasiswa). Ada empat hal yang kita tekankan di *ma'had* ini. *Pertama*, akidah islamiah. *Kedua*, kewirausahaan dan kepemimpinan. *Ketiga*, akrab dengan teknologi. *Keempat*, penguasaan bahasa Arab dan Inggris. *Kelima*, matematika agar para sarjana Muslim memiliki kecerdasan dan kecermatan dalam berpikir. Ada empat *output* dalam *ma'had* ini; *tahfiq al-îmân*, *al-ilmu wasî'*, *al-akhlâq al-karîmah*, dan *al-amal al-shâlih*.

Dalam rencana UIN, pada lima tahun mendatang, semua mahasiswa UIN harus diasramakan. Sekarang sudah jalan, namun mahasiswa wajib asrama baru untuk setahun pertama mengingat fasilitas sarana prasarannya belum tersedia. Insya Allah dengan pengembangan kampus di Jalan Soekarno-Hatta Bandung di lahan seluas 40 hektar, semua aktivitas akademik seperti ini bisa terfasilitasi.

Pengembangan kelembagaannya bagaimana?

Kita telah dan akan terus melakukan pengembangan fakultas maupun program studinya. Bukan hanya fakultas keagamaan, pengembangan juga dilakukan di fakultas umum dan kejuruan (vokasi) seperti pendirian Fakultas Psikologi dan Fakultas Sains dan Teknologi. Masing-masing fakultas memiliki program studi seperti Psikologi Industri, Psikologi Klinis, Biologi, Sains dan Informatika. Pada beberapa fakultas keagamaan seperti Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kita tambah Program Studi umum seperti Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika. Di Fakultas Syariah dan Hukum, kita tambah program studi Administrasi Negara dan Manajemen.

Ada fakultas baru yang dipersiapkan?

Saat ini kita sedang menunggu perizinan pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Hukum, dan Fakultas Kedokteran. Izinnya sudah kita ajukan sejak beberapa waktu lalu, mudah-mudahan bisa segera terwujud.

Bagaimana dengan lembaga-lembaga penunjang kegiatan akademiknya?

Kita mendirikan beberapa pusat studi atau lembaga kajian yang berfungsi mewadahi kegiatan akademik mahasiswa dan dosen. Ada Pusat Lingkungan, Pusat Informasi, Pusat Kerjasama, Pusat Studi Wanita, Lembaga Penelitian, dan Lembaga Pengabdian Masyarakat.

Mengenai kerjasama yang dibangun?

Kita menjalin kerjasama dengan beberapa universitas terkemuka dunia. Misalnya, Sudan University, Indiana University, Roehampton University of London, Middlesex University. Kampus-kampus ini siap menerima dosen-dosen kita untuk belajar ke sana. Dan pada 22 September lalu, kita juga menandatangani kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka Australia seperti Monash University dan Australian National University guna meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa.

Evaluasi Anda atas proses transformasi IAIN menjadi UIN selama beberapa tahun terakhir? Apa kekurangannya?

Terkait dengan aspek kelembagaan, menyangkut kebijakan Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Nasional. Pesan kami, kedua kementerian ini jangan ragu-ragu dan setengah-setengah dalam mendukung proses transformasi ini. Harus dibuka sepenuhnya (perizinan pendirian dan pengembangan fakultas-fakultas umum di UIN). Sebab jelas, payung hukumnya sendiri setingkat Peraturan Presiden di mana pengembangan program studi umum di institusi perguruan tinggi agama negeri harus didukung penuh Kementerian Pendidikan Nasional. Jangan seperti saat ini, (UIN Bandung) mau mendirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, prosesnya saja masih tersendat-sendat.

Ada kendala lain yang Anda alami selama ini?

Kami memohon, buka keran untuk para dosen di program studi umum UIN. Jangan sampai proses akreditasi mereka tersendat-sendat. Termasuk juga kebijakan anggarannya. Untuk program studi umum di UIN sampai saat ini belum ada anggaran yang mendukung pada kegiatan penelitian. Meski ada, tapi nominalnya maksimal Rp 10-12 juta saja. Kalau di fakultas umum, dana penelitian sebesar itu bisa untuk apa?

Apa harapan Anda untuk Kementerian Pendidikan Nasional?

Artinya kultur, semangat, *mindset* dan pengelolaan kebijakan di Kementerian Pendidikan Nasional juga harus diubah. Bahwa program studi umum berbeda kebutuhannya dengan program studi agama. Tidak bisa penelitian hanya didanai Rp 10 juta. Kalau di program studi agama, biaya penelitian Rp 10 juta mungkin masih bisa, sementara di umum dana penelitian Rp 12 juta sangat minim.

Kementerian Pendidikan Nasional juga harus 'membuka diri' bahwa program studi umum di UIN, memang secara kelembagaan di bawah asistensi Kementerian Agama, tapi secara akademik *kan* dibina oleh mereka. Dasar hukumnya Peraturan Presiden *kok*. Artinya, ketika misalnya dosen prodi umum UIN itu mengajukan beasiswa dan dana penelitian, seharusnya dibuka dukungannya. Tapi ini belum. Ini yang belum dimengerti mereka. Jangan-jangan mereka juga tidak tahu ada program studi umum di UIN.

Apa risikonya kalau *mindset* mereka masih seperti demikian?

Risikonya, kalau kebijakan dan implementasi turunannya dari tingkat pusat masih kurang mendukung, maka kehadiran UIN tidak akan begitu berbeda dengan IAIN seperti dulu. Tujuan utama transformasi dari IAIN menjadi UIN sulit tercapai. Karena itu, kehadiran UIN, baik dari aspek pendanaan maupun kebijakan, seharusnya menopang betul.

Bagaimana Anda menyikapi RUU PT?

Semangat RUU Pendidikan Tinggi seharusnya ditekankan pada peningkatan mutu pendidikan tinggi dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, prinsip-prinsip akademis tentang kesetaraan, keterbukaan, obyektivitas di perguruan tinggi harus terbuka dan universal. Jadi bisa saja penyelenggaraannya oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama. Tapi standar nasionalnya harus ada, jadi bisa diselenggarakan oleh kedua pihak tersebut. Yang penting mengacu ke standar itu.

Apa yang Anda inginkan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional?

Yang penting bagi UIN saat ini, Kementerian Agama harus membantu anggaran pembiayaan pengembangan UIN secara optimal. Kementerian Pendidikan Nasional juga semestinya konsisten dalam mengimplementasikan amanat Peraturan Presiden di mana program studi umum diasistensi mereka secara betuk-betul. Secara kelembagaan, biarkan UIN seperti ini. Tapi secara kebijakan, *political will*, Kementerian Pendidikan Nasional harus proaktif terhadap keberadaan program studi umum. Saya pikir, jangan-jangan Kementerian Pendidikan Nasional juga tidak tahu tentang adanya program studi umum di UIN.

Apa strategi yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan UIN ke depan?

Sebagai gambaran awal, calon mahasiswa yang mendaftar ke UIN Bandung saat ini meningkat empat kali lipat menjadi sekitar 11.000 orang dari sebelumnya hanya 2.000-3.000 calon mahasiswa. Sementara daya tampung kampus, ya maksimal kita sendiri hanya sekitar 3.500.

Apa artinya peningkatan ini?

Keberadaan UIN semakin diapresiasi oleh publik, menjadi tumpuan harapan proses pendidikan generasi mudanya. Animo pendaftar yang cukup besar ini harus disyukuri dengan meningkatkan pelayanan, bangunan fisik mendukung, sistem pengajaran yang berkualitas, dukungan dosen berpendidikan S2 S3 diperhatikan, karyawan juga ditambah dengan diiringi peningkatan kualitasnya, kurikulum juga harus diperhatikan. Sebab peran UIN ke depan akan semakin besar. □ ZAENAL MUTTAQIN (BANDUNG)

UIN Alauddin Makassar

Memperkenalkan Gerakan 1.000 Buku

Usianya memasuki tahun keenam. Awalnya tiga fakultas, lalu bertambah menjadi tujuh fakultas. Jumlah sivitas akademiknya terus menanjak. Kini, mencanangkan gerakan 1.000 buku.



JW/IDRIS THAHA

HARI BAHAGIA DAN ISTIMEWA akhirnya datang juga. Senyumnya mengembang hari itu. Wajahnya tampak berseri. Tak dinyana, kalau dianya dinyatakan sebagai mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi di Program Diploma III Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK), Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan.

Mahasiswi bernama Jumrah itu memperoleh IPK 3,91. Karenanya, ia memang pantas menyandang predikat *summa cum laude*. Bersama 50 mahasiswi Program Diploma III Kebidanan, Jumrah mengucapkan sumpah sebagai ahli madya kebidanan, di Grand Clarion Hotel & Convention Makassar, pada pertengahan bulan lalu.

Setelah pengambilan sumpah, pada Senin, 12 September 2011 itu, Jumrah dan para alumni lainnya dari Program Studi Kebidanan berhak dan resmi mendapat tugas pengabdian kebidanan di tengah-tengah masyarakat. Mereka mendapatkan hak melakukan pelayanan kebidanan. Sumpah itu menjadi awal dimulainya pengabdian mereka di bidang kebidanan.

Prosesi pengambilan sumpah itu dihadiri Rektor UIN Alauddin Makassar Prof Dr HA Qadir Gassing HT Ms, Pembantu Rektor I Bidang Akademik UIN Alauddin Prof Dr H Ahmad Sewang MA yang juga Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK), para pembantu dekan, pe-

mimpin daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI), pemimpin cabang Ikatan Bidan Indonesia, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Makassar serta para wali mahasiswi.

Ketua Prodi Kebidanan Sitti Saleha MKeb menjelaskan, para mahasiswi Prodi Kebidanan yang diambil sumpah tersebut telah menyelesaikan semua urusan akademik. Saleha berpesan agar para alumninya senantiasa menjaga nama baik almamater di tengah-tengah masyarakat. Selama menimba ilmu di UIN Makassar, mereka telah dibekali dengan pengetahuan agama untuk menjadi bidan muslimah. “Mudah-mudahan dengan bekal ilmu yang

dimiliki, mereka dapat bersaing dan mengabdikan kepada masyarakat,” kata Saleha berharap.

Untuk mengabdikan dalam bidang kesehatan, khususnya kebidanan, seharusnya bukan hal yang sulit bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kesehatan UIN Makassar. Itu karena, selama kuliah, mereka telah mendapat kesempatan magang dan mengikuti berbagai pelatihan dalam bidang kesehatan, termasuk kebidanan.

Sejak 2007, UIN Makassar telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Labuang Baji, Rumah Sakit Kallong Tala Gowa, Rumah Sakit Fatimah Makassar, dan Puskesmas Mamajang. Dalam nota kesepahaman dengan beberapa lembaga ini disebutkan, mahasiswa/i Fakultas Kesehatan UIN Makassar diberi kesempatan magang dan pelatihan dalam bidang kesehatan.

Keberhasilan UIN Alauddin Makassar meluluskan 51 mahasiswi Program Diploma III Kebidanan tahun ini merupakan buah dari perubahan status kelembagaan. Memang, mulai 10 Oktober 2005, IAIN berubah menjadi UIN Alauddin Makassar. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 57 Tahun 2005 Tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Dr H Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 Desember 2005 di Makassar.

Perubahan status kelembagaan itu merembet kepada

perkembangan fakultas. Pada awalnya (1962), perguruan tinggi Islam negeri di kawasan Indonesia timur ini berstatus fakultas cabang IAIN (kini UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta—yang saat itu memiliki tiga fakultas: Syariah, Tarbiyah, dan Ushuluddin. Ketiga fakultas ini mengubah statusnya menjadi mandiri (1965). Pada tahun-tahun berikut, IAIN Alauddin menambah dua fakultas; Fakultas Adab (1967) dan Fakultas Dakwah (1971), dan menyusul pendirian Program Pascasarjana (1993).

Kini, ketika menjadi UIN, fakultasnya menambah dua lagi; Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, Program Diploma III Kebidanan itu—selain Prodi Keperawatan, Prodi Farmasi, dan Prodi Kesehatan Masyarakat, berada dalam Fakultas Ilmu Kesehatan.

Status universitas semakin memacu kemajuan dan pengembangan, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Salah satunya dengan membangun kerjasama dengan berbagai lembaga, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Kerjasama itu berkaitan dengan pemberian beasiswa, pertukaran sivitas akademika, penyelenggaraan forum ilmiah, dan penerbitan karya ilmiah.

Tidaknya ratusan kerjasama yang telah dilaksanakan UIN Alauddin Makassar. Antara lain, dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, International Islam University Malaysia, Jami' Abnuur Syiria, Institute for the Studies of Islamic Science, Malaysia, University of Western Australia, Yayasan Ahlul Bait Iran, University of Hamburg, Bonn University, Koln University, Universitas Islam Umdurman, Republik Sudan, Universitas Internasional Afrika, Republik Sudan, Universitas al-Quran al-Karim Republik Sudan, Internatinal Peace University South Africa, Universitas Passau, dan Universitas McGill.

Untuk mendukung kerjasama itu, pada tahun akademik 2010/2011, UIN Makassar diperkuat 514 dosen—331 laki-laki dan 183 perempuan. Tenaga edukatif ini tersebar di tujuh fakultas dan berstatus sebagai dosen DPK. Yang bergelar doktor 89 orang dan 42 dosen bergelar gurubesar. Para doktor dan gurubesar ini menjadi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)—28 orang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)—23 orang, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF)—16 orang, Fakultas Adab dan Humaniora (FAH), Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)—masing-masing 10 orang, Fakultas Sains dan Teknologi (FST), dan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)—masing-masing satu orang.

Para dosen tersebut memberi kuliah kepada 11.227 mahasiswa pada tahun akademik 2010/2011. Mahasiswa-mahasiswi itu tersebar di FSH (1.747 orang), FTK (3.710 orang), FUF (466 orang), FAH

(822 orang), FDK (495 orang), FST (1.410 orang), FIK (1.409 orang), dan Program Pascasarjana (1.168 orang). Tahun akademik 2011/2012, UIN Makassar menerima 3.500 mahasiswa. Mereka disaring melalui enam jalur pendaftaran mahasiswa baru; yaitu PMJK (Penerimaan Mahasiswa Jalur Khusus, SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), SPMB PTAIN (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru), UMB PTN (Ujian Masuk Bersama, UML (Ujian Masuk Lokal), dan UMK (Ujian Masuk Khusus).

Menurut Pembantu Rektor Bidang Akademik Prof Dr Ahmad M Sewang, MA, para mahasiswa UIN Makassar wajib memiliki kemampuan baca tulis al-Quran. “Inilah salah satu karakteristik sebagai universitas Islam negeri,” kata guru-besar bidang sejarah ini.

Selama ini, kemampuan mahasiswa dalam baca tulis al-Quran bervariasi. Seperti dipaparkan alumni Pascasarjana UIN Jakarta ini terdapat enam kategori. Antara lain, mereka tidak mengenal huruf al-Quran, mengenal huruf-huruf al-Quran, tapi tidak bisa membacanya, terbata-bata membaca, lancar membaca tapi tidak bagus tajwidnya, lancar dan sempurna tajwidnya, dan mereka menghafal 20 juz al-Quran. “Baru empat mahasiswa yang mampu menghafal 20 juz. Mereka diberikan *reward* berupa pembebasan SPP,” kata Ahmad M Sewang.

Selain kerjasama dan peningkatan kualitas akademik sivitas akademik, UIN Makassar berjikaku menambah produk-produk akademik. Untuk empat tahun ke depan, UIN Makassar memperkenalkan “Gerakan 1.000 Buku”. Berarti, dalam setahun UIN Makassar harus menerbitkan 250 judul buku. Jenis buku yang akan diterbitkan adalah buku dasar, buku penunjang buku dasar, buku penelitian dosen, buku terjemahan, dan buku penelitian terpilih dari mahasiswa—baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi.

Berbagai langkah peningkatan kualitas dan kuantitas akademik terus digalakkan. Mulai dari kerjasama, sumberdaya manusia, dan produk-produk akademik lainnya, seperti menerbitkan seribu buku. UIN Makassar tak akan pernah berhenti untuk melahirkan sarjana muslim/ah terbaik. Termasuk “meluluskan” bidan-bidan muslimah, seperti Jumrah.

□ IDRIS THAHA (MAKASSAR)

JW/IDRIS THAHA



Rektor UIN Alauddin Makassar
Prof Dr A Qadir Gassing HT

Bila Memilih “Tut Wuri Handayani”



JW/IDRIS THAHA

SANTRI-SANTRI PESANTREN dan nonmuslim bisa menjadi mahasiswa. UIN terbuka untuk semua warganegara. Mahasiswa dibekali keterampilan dan wajib bisa baca al-Quran. RUU PT harus ditinjau ulang.

Mengapa IAIN Alauddin Makassar akhirnya berubah pula menjadi UIN?

Begini. Dasar pertama, setelah *road show* ke beberapa lembaga pendidikan, kita menemukan ternyata kurikulum yang dipakai di pesantren dan madrasah sama dengan kurikulum SMA. Karena itulah, kita ingin memberikan ruang kepada santri-santri yang juga anak-anak bangsa untuk memperoleh tempat di IAIN. *Masak* mereka lari dari IAIN, dan kuliah ke universitas lain.

Kedua, kita melihat waktu itu dari lima fakultas di IAIN Makassar, mahasiswanya sekitar 3.500 orang. Lo, kalau diulang berkali-kali seperti itu, IAIN bisa gulung tikar. Lalu, kita berpikir untuk membuka program studi-program studi umum yang diharapkan memperbanyak mahasiswa, khususnya di Fakultas Tarbiyah. Ketiga, peluang pasar kerja. Kalau kita hanya membuka prodi-prodi yang khusus Islam, maka daya tampungnya sangat terbatas.

Bagaimana respon masyarakat saat itu?

Kita tidak serta-merta mengubah. Kita *road show* dulu ke kiayi, ulama, dai, tokoh-tokoh Islam, walikota, dan gubernur. Respon mereka positif. Hanya beberapa ulama yang mempertanyakan, “Lo entar kalau jadi UIN hilang itu fakultas agama? Nanti seperti Universitas Islam Indonesia (UMI)

yang dulu Fakultas Agamanya besar sekarang menjadi fakultas kecil saja”. Beberapa dosen juga mewanti-wanti yang sama.

Apa evaluasi Anda terhadap UIN Makassar selama ini, khususnya dari sisi akademik?

Tantangan yang diberikan ulama dulu itu betul-betul kita perhatikan. Kita sangat fokus mempertahankan prodi-prodi seperti Perbandingan Agama, Prodi Tafsir Hadis, dan Prodi Akidah Filsafat. Memang, peminatnya relatif cukup kurang. Per tahun hanya membuka satu kelas. Ya, sekitar 15-20 orang. Saya malah tegaskan, walau hanya tiga pendaftar, Prodi Akidah Filsafat harus jalan. Alhamdulillah pada tahun ke-3 menjadi UIN, ada sokongan Kementerian Agama mensuplay dana prodi yang miskin dan kurang peminatnya.

Prodi-prodi agama berkurang peminatnya?

Bukan berkurang. Tetap saja ada peminat tradisional. Kenapa kita bilang mengurang, karena prodi yang lain ini melonjak jumlah peminatnya. Kesannya memang berkurang, padahal tidak. Dalam banyak hal, beberapa prodi agama ikut naik peminatnya. Misalnya, Prodi Pendidikan Agama Islam, Peradilah Agama. Yang tadinya hanya 40 orang pendaftar menjadi 80 orang. Jadi, memang ada prodi yang tidak berkembang cepat.

Tampaknya, kurangnya peminat di beberapa prodi agama menjadi trend pada enam UIN. Komentar Anda?

Begini. Masyarakat kan haus akan kerja. Nah prodi-prodi agama itu tidak pernah ada di pengumuman penerimaan pegawai atau karyawan. Kalau misalnya nama prodi itu dicantumkan di dalam pengumuman penerimaan tenaga kerja, maka akan menambah minat masyarakat untuk mendaftar ke situ.

Tidak semua prodi agama memang berorientasi untuk kerja. Misalnya, Prodi Perbandingan Agama atau Prodi Akidah Filsafat. Komentar Anda?

Setiap prodi memang memiliki kompetensi. Solusinya, kita membuka PIKIH, yaitu Pencerahan Imani dan Keterampilan Hidup. Kita memberi mahasiswa prodi tersebut keterampilan bahasa asing.

Masuk ke dalam kurikulum?

Tidak. Tapi, wajib diikuti. Tidak ada SKS-nya, tapi wajib

diikuti. Nah sekarang, saya jadikan itu sebagai CBT (*Character, Building, and Training*). Penekanannya, seluruh mahasiswa harus pintar baca tulis Quran. Tidak boleh tidak. Bahkan, harus juga pintar menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan prodinya. Tahu makna, tafsir, dan tahu aplikasinya di masyarakat dan tahu aplikasinya dalam pengembangan ilmu yang digelutinya.

Bagaimana bentuk integrasi keilmuan, antara nonagama dan agama?

Kita masukkan ke dalam kurikulum, silabi, dan pokok-pokok bahasan di setiap matakuliah. Nuansa Islam, istilah kita di sini harus masuk nilai-nilai Islam, di setiap matakuliah. Kita juga memasukkannya ke dalam buku-buku teks. Kita sudah tiga tahun membiayai penerbitan buku-buku teks. Sekarang kita sudah memproduksi 60 buku teks. Insya Allah tahun ini saya memprioritaskan program “Gerakan 1.000 buku”. Tiap tahun akan terbit 250 buku teks. Jadi, dalam empat tahun, kita mempunyai 1.000 buku teks yang menunjang integrasi keilmuan.

UIN kini menjadi perguruan tinggi Islam negeri yang terbuka?

Ya. Kita tidak lagi hidup dalam satu bidang ilmu yakni bidang agama. Syarat menjadi universitas kan harus punya enam prodi umum. Nah sekarang kita punya sekitar 21 prodi. Persoalannya, ketika UIN sudah masuk SNMPTN, yang masuk tiga tahun lalu. Lalu, masyarakat pun mendaftar. Nah, tahun ini kebetulan ada dua non-muslim yang lulus melalui SNMPTN. Semuanya laki-laki.

Sesuai dengan aturan, mereka harus ikut tes baca al-Quran. Tidak bisa ditolak. Mereka mengatakan tidak bisa membaca al-Quran. Kita katakan, “apakah mau belajar?” Mereka menjawab “siap”. Mereka diterima di Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Ilmu Kesehatan.

Apa problem yang Anda hadapi?

Perlu saya katakan, bahwa nomenklatur UIN sekarang ini kan masih nomenklatur IAIN yang tujuannya “mencetak sarjana muslim”. Nah ini harus diubah. Kalau tidak, kita tidak bisa mengeluarkan mereka sebagai sarjana. Karena, mereka nonmuslim. Itulah persoalannya. Kita mau agar Kementerian Agama mau mempertimbangkan dan meninjau kembali tujuan UIN. Sebab, kita tidak mungkin menutup diri dari pendaftar nonmuslim. Kita menengok sejarah dari nabi, sahabat, khulafa, yang memberikan peluang kepada pihak nonmuslim untuk belajar.

Sebagai perguruan tinggi Islam negeri, negara tidak boleh menolak warga negaranya yang mau ikut pendidikan. Persoalannya, bagaimana kalau jumlah mereka semakin banyak. Bisa-bisa nanti mereka minta gereja di UIN.

Bagaimana bila ada perempuan nonmuslimah yang diterima di UIN?

Ya, harus berjilbab. Itu aturan kampus kita.

Bagaimana respon sivitas akademika ketika ada mahasiswa nonmuslim?

Tentu saja ada yang protes dan banyak pula yang setuju. Filosofinya, bahwa Islam ini bukan hanya untuk orang Islam tetapi untuk rahmatan lilalamin. Kita memberikan ilmu kepada siapapun yang ingin menuntut ilmu itu, tidak terkecu-

ali nonmuslim. Apa pun niatnya, dan apa pun tujuannya.

Hingga kini ada enam UIN yang sudah berdiri. Apa perlu distop?

Agak susah berbicara soal ini. Banyak IAIN yang sekarang siap-siap menjadi UIN. Saya tidak punya hak untuk mengatakan cukup atau tidak. Mestinya kita kembalikan kepada esensi pendidikan.

Apa komentar Anda terhadap RUU Pendidikan Tinggi yang dibicarakan di legislatif?

Dari RUU PT itu, ada pertanyaan, apakah UIN mau bergabung ke Kemendiknas atau tetap di Kemenag. Kalau alasannya agar dana pembinaan pendidikan lebih mantap, saya kira perlu dipertanyakan, jangan-jangan alasan itu tidak tercapai. Karena, kita akan menjadi “anak baru” di lingkungan Kemendiknas.

Saya justru malah mengusulkan bentuk kementerian tersendiri. Saya ingin agar seluruh perguruan tinggi di Indonesia dikelola satu kementerian. Bisa jadi namanya Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Seluruh pendidikan tinggi di seluruh kementerian melebur, baik swasta maupun negeri. Tidak usah tambah kementerian, karena Kementerian Riset sudah ada.

Apa alasannya?

Secara filosofis, insya Allah tidak akan ada lagi perbedaan aturan yang dibuat Kemendiknas maupun Kemenag. Semuanya sama. Begitu pula soal pengangkatan gurubesar. Juga berkaitan dengan perlakuan dalam anggaran. Tidak ada lagi perbedaan pembagian anggaran pendidikan. Kita sama-sama mendidik anak bangsa.

Tapi, kalau Anda disuruh memilih, apakah UIN Makassar akan ke Kemendiknas atau Kemenag?

Kalau perlakuan Kemenag terhadap UIN Alauddin begini terus, lebih bagus ke Kemendiknas, dengan tidak mengurangi penghargaan kita kepada pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan Kemenag. Tapi, pada sisi lain ada bahayanya. Kalau kita ke Kemendiknas, lambat laun pendidikan di Kemenag bisa habis.

Anda setuju dengan RUU PT yang menyebutkan PTN Khusus?

Agak repot, kalau RUU PT itu disahkan. Kita tolak. Tidak ada itu istilah PTN Khusus. Kalau kita terima istilah PTN Khusus, maka UIN bubar karena Kemenag hanya bisa mengurus pendidikan agama, dan Kemenag tidak boleh mengurus perawat, farmasi, dan prodi-prodi umum.

Apa yang membedakan UIN Makassar dengan UIN lainnya. Apa kekuatannya secara akademik.

Hadis. Dulu tafsir sebagai keilmuan pokoknya.

Bagaimana dengan kualitas SDM dosen?

Saya punya target pada akhir masa jabatan pada 2015, kita memiliki 40% professor dan 60% doktor dari sekitar 600 dosen. Sekarang, kita punya 42 gurubesar.

Apakah UIN-UIN memiliki standar keagamaan yang sama, misalnya matakuliah MKDU?

Selama ini, kita jalan sendiri-sendiri. Prinsipnya, ada empat matakuliah pokok harus menjadi dasar untuk membangun studi islam. Yaitu, tafsir, hadis, pemikiran, dan sejarah. □

IDRIS THAHA (MAKASSAR)



Komaruddin Hidayat

UIN dalam Perbincangan

BAIK DI KALANGAN ANGGOTA DPR, masyarakat, maupun pengamat dunia pendidikan, keberadaan dan perkembangan UIN menjadi sorotan dan bahan perbincangan. Di lingkaran Komisi X DPR kini tengah berlangsung pembahasan RUU Perguruan Tinggi yang juga mempertanyakan kelayakan dan legalitas UIN di bawah Kementerian Agama. Bukankah semua universitas semestinya di bawah Kementerian Pendidikan Nasional?

Di kalangan masyarakat pun muncul dua pendapat dalam meresponi mengapa enam IAIN (Institut Agama Islam Negeri) sekarang berkembang menjadi UIN (Universitas Islam Negeri). Sebagian bersikap ragu dan menyayangkan, jangan-jangan dengan beralihnya IAIN menjadi UIN akan memarginalkan dan mendangkalkan studi keislaman yang sudah berlangsung di IAIN. Dan itu berarti mengkhianati khittah awal berdirinya IAIN serta tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat akan sarjana-sarjana yang ahli ilmu keagamaan sebagai juru dakwah.

Bagi mereka yang mendukung menjadi UIN, ada beberapa argumen yang mengemuka:

Pertama, meskipun telah menjadi UIN, fakultas keagamaan tetap berkembang bahkan ada kecenderungan meningkat kualitasnya karena muncul semangat kompetisi dengan fakultas umum. Untuk menjaring mahasiswa yang berkualitas, Fakultas keagamaan di UIN menyediakan berbagai macam beasiswa. Di UIN Jakarta beasiswa ini juga disediakan bagi mahasiswa yang hafal al-Qur'an minimal sepuluh juz.

Kedua, dengan menjadi UIN, sesungguhnya perkembangan ini merupakan langkah strategis untuk menyambung benang sejarah yang terputus dari tradisi universitas Islam abad tengah yang memang tidak ada pemisahan antara ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan pada umumnya, termasuk bidang kedokteran dan astronomi. Jadi, jika tetap mempertahankan dikhotomi kajian ilmu agama dan non-agama tanpa disadari kita ikut mendukung paham sekularisasi dalam dunia pendidikan Islam.

Ketiga, perubahan menjadi UIN memiliki dasar teologis dan Quranik yang sangat kuat mengingat al-Quran sendiri mengandung isyarat agar umat Islam melakukan riset dan mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Bagi mereka yang akrab dengan al-Quran, statemen ini tidak perlu dijelaskan lagi. Karena al-Quran, dahulu padang pasir Arabia secara spektakuler berubah menjadi sumber ilmu pengetahuan dan peradaban yang masih tetap bergetar sampai hari ini.

Keempat, secara ideologis-politis, keberadaan UIN menjadi jembatan yang mendekatkan antara masyarakat (umat Islam) dan pemerintah (negara) yang seringkali muncul konflik soal ideologi negara. UIN adalah salah satu perwujudan dari Pancasila, bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan (*religious state*), bukannya *Islamic State* meskipun mayoritas rakyatnya beragama Islam. Dengan ungkapan lain, UIN dengan para alumni dan jaringannya berperan sebagai peredam berbagai potensi radikalisme keagamaan yang membuat repot negara dan masyarakat.

Kelima, UIN berperan sebagai katalisator dan inkubator bagi kalangan santri yang selama ini terpinggirkan untuk bisa memperoleh pendidikan lebih tinggi dengan memasuki fakultas umum tanpa merasa terasing dari identitas dan kultur kesantriannya. Ini paling dirasakan antara lain oleh alumni pesantren yang sekarang sudah tamat dari Fakultas Kedokteran, Ekonomi, Psikologi, Saintek, FISIP, Komunikasi, dan lainnya.

Kelima, agenda besar UIN yang tengah dirintis adalah proses integrasi ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu umum, yaitu ilmu alam, humaniora dan sosial. Dengan program besar ini maka sarjana UIN diharapkan memiliki pengetahuan keagamaan dan ilmu umum yang seimbang. Untuk meraih ini tentu banyak persyaratan yang mesti dipenuhi oleh UIN, antara lain tenaga dosen ahli, struktur dan muatan kurikulum serta kultur kampus yang mendukung.

Keenam, keberadaan dan perkembangan enam UIN saat ini telah memberikan inspirasi, motivasi dan model

bagi reformasi dunia pendidikan tinggi Islam di Indonesia, terutama yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama. UIN bagaikan sebuah lokomotif yang di belakangnya berderet gerbong panjang lembaga pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.

Ketujuh, Indonesia yang oleh pengamat asing sering disebut sebagai *the largest muslim country in the world* sudah selayaknya memiliki universitas Islam yang menjadi kebanggaan, ikon dan representasi harapan masyarakat untuk memiliki universitas berstandar internasional. UIN Jakarta adalah satu yang pantas dipertimbangkan mengingat letaknya dekat dengan Ibu Kota.

Mau Berinduk ke mana UIN

Sekarang ini lembaga DPR bersama pemerintah tengah membahas RUU Perguruan Tinggi yang nantinya akan sangat

tinggi Islam negeri sangat membantu bagi proses pendidikan anak-anak santri dan bagi bangsa ini.

Baru akhir-akhir ini saja setelah anggaran pendidikan naik menjadi 20% UIN mulai menggeliat, mendapatkan tambahan anggaran meskipun belum disertai program strategis jangka panjang untuk membangun UIN. Namun demikian tanda-tanda dan komitmen ke arah itu sudah terlihat. Bahwa UIN tetap memihak pada rakyat kecil, agenda besarnya adalah integrasi keagamaan dan keilmuan dan menjadikan UIN sebagai kebanggaan umat serta bangsa baik dalam skala nasional maupun internasional.

Sebagai *the largest and the most democratic muslim country in the world* Indonesia memerlukan perguruan tinggi Islam yang *prestigious* dan pusat riset unggulan untuk menjelaskan pada dunia tentang dinamika keislaman, keindonesiaan, dan



JW/DOK

berpengaruh terhadap posisi UIN dan IAIN serta STAIN. Meski statusnya negeri, baik UIN, IAIN maupun STAIN secara emosional dan kultural sangat dekat dengan umat Islam dan masyarakat desa yang termarginalkan dari proses pembangunan. Perguruan tinggi ini banyak menampung kalangan santri desa yang secara ekonomi pas-pasan.

Seringkali muncul kritik dan kecewaan, alumninya dianggap serba tanggung dalam penguasaan bidang agama maupun sains. Pendeknya mengecewakan harapan masyarakat. Namun cara pandangnya bisa saja dibalik. Andaikan tidak ada UIN, IAIN dan STAIN, siapakah yang akan menyalurkan mereka untuk meraih pendidikan lebih tinggi bagi kalangan santri desa? Pada hal sebagai warga negara semuanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang wajar dengan biaya APBN. Tanpa bantuan APBN, perguruan tinggi keagamaan sangat berat untuk berkembang. Dengan segala kekurangan yang ada, keberadaan perguruan

kemoderenan. Untuk agenda ini adalah UIN yang paling strategis. Tentu saja untuk upaya ini memerlukan waktu, sumber daya manusia unggul, program strategis dan dana besar yang didukung tidak saja oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, melainkan juga memperoleh perhatian khusus dari Presiden.

Jadi membincang keberadaan dan visi serta misi UIN tidak sekadar menyangkut kebijakan administrasi dan anggaran, melainkan kita berbicara tentang pengelolaan aset budaya bangsa, *nation branding*, deradikalisasi, dan mendekatkan antara masyarakat dan negara yang secara jenius visinya sudah tersurat dan tersirat dalam Pancasila. Ibarat benih pohon besar, wadah yang tersedia bagi UIN di Kementerian Agama dirasakan sudah sempit. Tetapi, andaikan berinduk ke Kementerian Pendidikan Nasional, apa jaminannya akan mampu mengelola dan mengembangkan UIN dengan prestasi dan visi tersebut di atas? []